



GUBERNUR JAWA TENGAH

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 85 TAHUN 2016
TENTANG**

**RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2015 – 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
 5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 – 2019

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik.
7. Pembangunan Daerah adalah serangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah.
8. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RAD-PG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015–2019 adalah Rencana Aksi Daerah Pencapaian Target Pembangunan Pangan dan Gizi Tahun 2015–2019.

BAB II RAD-PG

Pasal 2

RAD-PG merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pencapaian status gizi bagi masyarakat di Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.

Pasal 3

- (1) Sistematika RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kondisi Umum, Tantangan Dan Hambatan
 - c. BAB III : Arah Kebijakan Dan Strategi
 - d. BAB IV : Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi
 - e. BAB V : Kerangka Pelaksanaan Dan Monitoring Evaluasi
 - f. BAB VI : Penutup
- (2) Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

RAD-PG menjadi pedoman Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk menyusun Rencana Kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam upaya percepatan pencapaian target pembangunan pangan dan gizi masyarakat di Jawa Tengah.

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD- PG.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Desember 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 19 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH.

ttd

SRI PURYONG KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 85

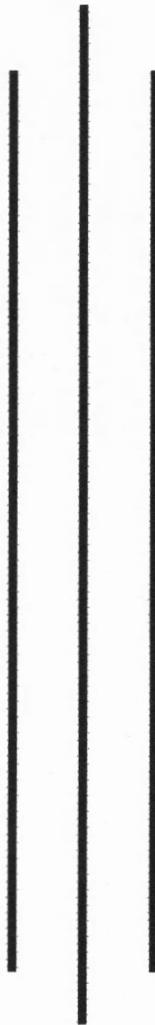
LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 85 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2015 – 2019

DOKUMEN
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN
GIZI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2015 – 2019

DRAFT



**RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG)
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2015-2019**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
2016**

KATA PENGANTAR

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Jawa Tengah merupakan Rencana Aksi Daerah untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia dan pada khususnya di Provinsi Jawa Tengah, bercirikan manusia yang cerdas, sehat, produktif dan memiliki daya saing tinggi. Untuk mewujudkan SDM di Provinsi Jawa Tengah yang berkualitas diperlukan kerjasama berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, legislatif, dunia usaha, masyarakat madani dan keluarga sebagai ujung tombak terdepan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya Pasal 63 (ayat 3) yang menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 142 ayat (5) yang menyebutkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan upaya untuk mencapai status gizi yang baik. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, khususnya pasal 1 ayat (1) yang mengatur ketahanan pangan dan gizi serta Pasal 37 (ayat 1) yang mengatur tentang perbaikan Status Gizi masyarakat, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi Tahun 2015-2019, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

RAD-PG tahun 2015-2019 merupakan periode ke-dua (periode pertama tahun 2011-2015) yang menggunakan pendekatan multisektor yang melibatkan 18 SKPD dan 3 Instansi Pusat Kanwil di Provinsi Jawa Tengah. Pola pendekatan yang digunakan masih sama dengan pendekatan pada periode tahun 2011-2015 yaitu 5 (lima) Pilar, yaitu : (1) Pembinaan Gizi Masyarakat terdiri dari SKPD/Instansi : Dinkes, BKP, BP3AKB, Dindik, Kanwil Kemenag; (2) Peningkatan Aksesibilitas Pangan Beragam terdiri dari SKPD/Instansi : BKP, Set Bakorluh, Dinperian TPH, Dinbun, Dinakeswan, Dinlutkan, Dishubkominfo, Dinsos, Dinperindag, PSDA; (3) Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan terdiri dari SKPD/Instansi : BBPOM, Dinakeswan, Dinperian TPH, Dinperindag, BKP, Dinlutkan; (4) Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat terdiri dari SKPD/Instansi : Dindik, Dinkes, BLH, Bappermasdes, Dinsos, BP3AKB, Dinpora, Dishubkominfo, Cipkataru; dan (5) Penguatan Kelembagaan terdiri dari SKPD/Instansi : Bappeda, Dinkes, Set Bakorluh, Bappermasdes, Dinperian TPH, Dinakeswan, BKP, Dindik, Dinlutkan, Disnakertransduk, BP3AKB, Kanwil BPS.

Sebagai tindak lanjut dari RAD-PG Provinsi Jawa Tengah, maka di Kabupaten/Kota disusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten/Kota yang juga menggunakan pendekatan multisektor. Landasan hukum RAD-PG dalam bentuk Peraturan Gubernur di Provinsi dan Peraturan Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota.

Kami menyampaikan terima kasih kepada segenap pihak terkait yang telah berpartisipasi dalam penyusunan RAD-PG tahun 2015-2019. Kami menyadari dokumen ini belum sepenuhnya sempurna sehingga sekiranya ada masukan akan kami jadikan bahan untuk perbaikan selanjutnya. Semoga seluruh upaya kita ini bermanfaat untuk kesejahteraan bersama.

Semarang,

Nopember 2016

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	2
C. Dasar Hukum	3
BAB II KONDISI UMUM, TANTANGAN DAN HAMBATAN	
A. Kondisi Umum Pencapaian Pembangunan Pangan dan Gizi	
1. Pangan	4
a. Pengembangan Ketersediaan Pangan.....	4
b. Pengembangan Sistem Distribusi dan Akses Pangan serta Stabilitas Harga Pangan	11
c. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar.....	15
d. Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.....	17
2. Gizi	20
a. Pravelensi Pendek (<i>Stunting</i>) pada Anak Balita di Provinsi Jawa Tengah dibandingkan Nasional.....	21
b. Pravelensi Pendek (<i>Stunting</i>) pada Anak Balita per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.....	21
c. Pravelensi Gizi Kurang dan Buruk pada Anak Balita (Indeks BB/TB) di Provinsi Jawa Tengah dibandingkan Nasional.....	22
B. Tantangan dan Hambatan	
1. Perbaikan Gizi Masyarakat.....	26
2. Peningkatan Aksesibilitas Pangan Beragam	29
3. Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	30
4. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.....	31
5. Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi.....	32
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Pangan dan Gizi.....	33
B. Peran serta Dampak Pangan dan Gizi dalam Pembangunan	
1. Peran dan Dampak Pangan dalam Pembangunan	34
2. Peran dan Dampak Gizi dalam Pembangunan	34
3. Dampak Pangan dan Gizi terhadap Penyakit.....	36

BAB IV	RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI	
3.		
4.		
	A. Faktor Penentu Pangan dan Gizi	37
	B. Intervensi Pilar RAD PG.....	40
	C. Program/Kegiatan dan Jumlah Indikator RAD PG	44
BAB V	KERANGKA PELAKSANAAN DAN MONITORING EVALUASI	
	A. Kerangka Kelembagaan	49
	1. Tim Pengarah	49
	2. Tim Penyusun	49
	3. Tugas dan Tanggung Jawab.....	51
	B. Pengembangan Kapasitas.....	51
	C. Monitoring dan Evaluasi.....	52
BAB VI	PENUTUP	54

LAMPIRAN :

1. Matrik Target Indikator Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Povinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Skor Pola Pangan Harapan Jawa Tengah Tahun 2014..... 15
Tabel 2.2	Konsumsi Kelompok Pangan di Jawa Tengah Tahun 2011-2014 (kkal/kap/hari)..... 16
Tabel 2.3	Konsumsi Energi di Jawa Tengah Th 2011-2014 (kkal/kap/hari)..... 16
Tabel 2.4	Capaian Pilar Peningkatan Aksesibilitas Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015..... 17
Tabel 2.5	Status Pencapaian Pembangunan Pilar Gizi Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015..... 25
Tabel 4.1	Kerangka Konsep Implementasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah 2015-2019..... 42
...	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	Ketersediaan Padi, Jagung, Ubi Kayu di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2014..... 5
Gambar 2.2	Ketersediaan Kedelai, Kacang Hijau, Kacang Tanah, Ubi Jalar dan Gula di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2014..... 5
Gambar 2.3	Perkembangan Produksi Tanaman Hortikultura Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2014 (Ton)..... 6
Gambar 2.4	Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan untuk Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014 (Ton)..... 6
Gambar 2.5	Perkembangan Produksi Tanaman Tebu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014 (Ton)..... 7
Gambar 2.6	Perkembangan Produksi Daging, Telur dan Susu di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2014..... 7
Gambar 2.7	Perkembangan Produksi Perikanan di Jawa Tengah Tahun 2011-2014 (Ton)..... 8
Gambar 2.8	Ketersediaan Energi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014 (kkal/kap/th)..... 9
Gambar 2.9	Ketersediaan Protein Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014 (gram/kapita/hari)..... 9
Gambar 2.10	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014..... 11
Gambar 2.11	Peta Ketersediaan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015..... 13
Gambar 2.12	Peta Akses Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015..... 13
Gambar 2.13	Peta Pemanfaatan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015..... 13
Gambar 2.14	Perkembangan Penyaluran Raskin Tahun 2011-2014..... 14
Gambar 2.15	Asupan Kalori Penduduk Jawa Tengah Tahun 2011-2014..... 17

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pembangunan yang paling mendasar di Provinsi Jawa Tengah adalah Pembangunan sumberdaya manusia (SDM), dan hal ini selalu menjadi salah satu prioritas Pembangunan Skala Nasional maupun Daerah dari satu Periode Pemerintahan ke periode berikutnya. Selain itu untuk mewujudkan SDM di Provinsi Jawa Tengah yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dilakukan melalui pembangunan pangan dan gizi untuk meningkatkan kualitas hidup, produktivitas dan kemandirian. Pembangunan Pangan dan Gizi merupakan rangkaian aktivitas pembangunan multisektor, mulai dari aspek produksi pangan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi sampai pada aspek pemanfaatan yang mempengaruhi status gizi.

Pangan menjadi hak asasi manusia bagi setiap rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-Undang tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi menegaskan bahwa Ketahanan Pangan dan Gizi adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan Pangan dan Gizi bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, memenuhi kecukupan Gizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk mewujudkan Status Gizi yang baik agar dapat hidup sehat, aktif, dan produktif berkelanjutan. Kesehatan menurut Undang-undang Kesehatan Tahun 2009 yaitu keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pada Bab VIII Gizi Pasal 141 (1) Upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk peningkatan mutu gizi perseorangan dan masyarakat. Peningkatan mutu gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan salah satunya dengan Peningkatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.

Ketahanan Pangan dan Gizi sangat penting untuk mencegah terjadinya kerawanan pangan dan penurunan derajat kesehatan masyarakat. *Scaling-Up Nutrition Movement (SUN Movement)* sebagai bagian dari Pembangunan Ketahanan Pangan dan Gizi Nasional yang menekankan perlunya penguatan intervensi yang bersifat spesifik dan sensitif dalam penanganan masalah gizi, khususnya masalah anak pendek atau *stunting* yang perlu ditangani sejak masa janin. Gerakan ini dikenal dengan istilah Gerakan Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat yang memfokuskan intervensi kesehatan dan gizi pada seribu hari pertama kehidupan, yaitu sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia dua tahun (Yudiarti, dkk, LIPI, Prosiding WNPG X Jakarta, 2014).

Provinsi Jawa Tengah saat ini masih mengalami beban masalah gizi ganda (*double burden malnutrition*) yaitu masih ada masalah kekurangan gizi dan kelebihan gizi pada beberapa siklus kehidupan manusia. Beban masalah gizi ganda tersebut terutama berawal dari kekurangan dan kelebihan gizi pada fase awal kehidupan yang memicu berbagai konsekuensi pada usia dewasa. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kemenkes RI Tahun 2013 menunjukkan perbaikan status gizi masyarakat belum dapat menurunkan prevalensi masalah gizi secara nyata dan diindikasikan ada peningkatan Pendek (*Stunting*) pada anak Balita dari 35,6 persen Tahun 2010 menjadi 37,2 persen Tahun 2013 (Peningkatan 1,6%). Sementara itu gizi lebih (*overweight*) menunjukkan perbaikan yaitu menurun dari 12,2 persen Tahun 2010 menjadi 11,9 persen Tahun 2013 (Penurunan 0,3%). Hal ini menegaskan perlunya mengarahkan Pembangunan Ketahanan Pangan dan Gizi terutama pada 1.000 Hari Pertama

Kelahiran (HPK) untuk mencegah masalah Gizi Ganda sejak Usia Dini. memenuhi kebutuhan dasar manusia.

Sejalan dengan motto “*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*” yang implementasinya dirumuskan dalam Visi, Misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Tengah Tahun 2013-2018, Ketahanan Pangan dijadikan prioritas pembangunan Pemerintah Jawa Tengah.

Empat Dimensi Ketahanan Pangan terdiri dari : Ketersediaan Pangan (*Food availability*), Keterjangkauan Pangan (*Food access*), Penggunaan Pangan (*Food utilization*), Stabilitas Ketahanan Pangan (*Stability of food security*) (*Food and Agricultural of United Nation*, 2003). Peningkatan ketahanan pangan tercermin dengan tersedianya pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, merata dan terjangkau.

Langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Jawa Tengah dalam **Pembangunan Ketahanan Pangan** adalah dengan : 1) Memantapkan ketersediaan dan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat; 2) Meningkatkan aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan; 3) Memperlancar pasokan dan fasilitas tunda jual serta stabilitas harga; 4) Mengembangkan kelembagaan dan sarana pengolahan serta pemasaran di perdesaan; 5) Memantapkan kewaspadaan pangan dan gizi masyarakat; 6) Mempercepat proses diversifikasi konsumsi pangan yang bertumpu pada potensi sumberdaya lokal; 7) Meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang bermutu, aman dan bergizi; 8) Tercukupinya ketersediaan pangan yang memenuhi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas bagi masyarakat; 9) Pengembangan komoditas pangan dengan menggunakan varietas unggul baru, penyediaan dan penggunaan sarana produksi; 10) Peningkatan kemampuan dan keterampilan petani; dan 11) Peningkatan dukungan terhadap pengelolaan lahan kering dan air tanah untuk pengembangan tanaman pangan.

Kualitas sumberdaya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Sumberdaya manusia yang memiliki fisik yang kuat, mental yang tangguh, kesehatan yang prima, serta tangkas dan cerdas sangat ditentukan oleh status gizi yang baik. Status gizi sangat dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas asupan pangan yang dikonsumsi. Masalah gizi dipengaruhi secara langsung oleh konsumsi makanan dan penyakit infeksi. Secara tidak langsung dipengaruhi oleh pola asuh, ketersediaan dan konsumsi pangan beragam, faktor sosial, ekonomi, budaya, politik, dan Peraturan Perundangan. Dampak buruk kekurangan gizi berakibat pada kondisi tubuh yang rentan penyakit, kesempatan sekolah rendah yang berakibat ketidakcerdasan otak, dan potensi sumberdaya manusia yang hilang. Di samping itu menimbulkan biaya kesehatan yang tinggi serta rendahnya produktivitas kerja, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu investasi di Bidang Gizi sangat penting dalam upaya memutuskan lingkaran setan kemiskinan dan kurang gizi dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Dalam RPJMD Jawa Tengah Tahun 2013-2018 ditegaskan **Kebijakan Peningkatan Status Gizi Masyarakat** dengan : 1) Peningkatan kualitas akses pelayanan kesehatan dasar (Puskesmas, Puskesmas pembantu, Poliklinik Kesehatan Desa/PKD) dalam rangka meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat Jawa Tengah; 2) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam rangka perilaku hidup sehat, perbaikan gizi masyarakat dan perbaikan sanitasi lingkungan; 3) Pengawasan di bidang farmasi, makanan dan perbekalan kesehatan; 4) Peningkatan kemampuan dan kualitas rumah sakit; 5) Upaya peningkatan kesehatan baik jasmani maupun rohani, sosial dan spiritual; 6) Peningkatan pelayanan RSUD dan RSJD Provinsi. **Strategi Terjaminnya Kedaulatan Pangan Melalui Ketersediaan (Produksi dan**

Cadangan Pangan) yang ditempuh adalah : 1) Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan; 2) Peningkatan akses masyarakat terhadap pangan; 3) Peningkatan diversifikasi konsumsi melalui sumberdaya lokal; 4) Perlindungan petani dan lahan pertanian serta pengendalian alih fungsi lahan.

Penanganan masalah gizi di Provinsi Jawa Tengah perlu mendapatkan penanganan melalui pendekatan multisektoral, sehingga di dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 melibatkan 19 SKPD Provinsi Jawa Tengah meliputi : 1). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2). Dinas Kesehatan; 3). Badan Ketahanan Pangan; 4). Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB), 5). Dinas Pendidikan; 6). Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh); 7). Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan; 8). Dinas Perkebunan; 9). Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 10). Dinas Kelautan dan Perikanan; 11). Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo); 12). Dinas Sosial; 13). Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 14). Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA); 15). Badan Lingkungan Hidup; 16). Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapermasdes); 17). Dinas Pendidikan; Pemuda dan Olah Raga; 18). Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang; 19). Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan; dan Tiga (3) Perwakilan Instansi Pusat di Provinsi Jawa Tengah yaitu : 1). Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan; 2). Kantor Wilayah Kantor Agama; dan 3). Badan Pusat Statistik.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2019 sebagai berikut :

1. Amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya Pasal 63 (ayat 3) yang menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun; Amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Khususnya Bab VIII Gizi Pasal 141, 142, 143.
2. Menjadi Panduan dan Arah serta acuan bagi Institusi Pemerintah, Lembaga/Organisasi Masyarakat dan Swasta pada tataran Provinsi Jawa Tengah yang dilandasi komitmen bersama untuk melakukan peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi guna mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul di Provinsi Jawa Tengah melalui Perbaikan Pangan dan Gizi;
3. Bagi Kabupaten/Kota untuk dapat berperan serta meningkatkan kontribusi yang optimal dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan dan Gizi di Provinsi Jawa Tengah.

C. Dasar Hukum RAD-PG

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya Pasal 63 (ayat 3) yang menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Bab VIII Gizi Pasal 141, 142, 143;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;

7. KSRAN-PG Tahun 2015 – 2019;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018.

BAB II KONDISI UMUM, TANTANGAN DAN HAMBATAN

A. Kondisi Umum Pencapaian Pembangunan Pangan dan Gizi

1. Pangan

Situasi pangan berkaitan dengan keadaan kemampuan semua sumberdaya yang dimiliki suatu daerah untuk memperoleh pangan yang cukup untuk kebutuhan gizi. Situasi pangan ini mencakup ketersediaan pangan, distribusi pangan, akses pangan dan stabilitas harga pangan, serta konsumsi pangan.

a. Pengembangan Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan sebagai salah satu subsistem ketahanan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanan pangan. Ketersediaan pangan mencerminkan pangan yang tersedia untuk dikonsumsi masyarakat yang merupakan produksi daerah dengan mempertimbangkan penggunaan untuk bibit/benih, industri, kehilangan/susut, ekspor dan *stock* ditambah impor.

Sedangkan untuk ketersediaan pangan utama adalah suatu kondisi dimana tersedianya Pangan Utama dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Daerah serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

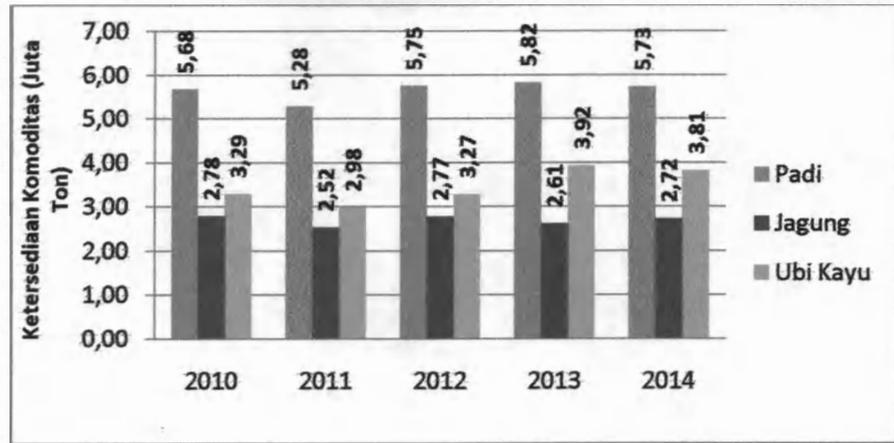
Ketersediaan pangan di Jawa Tengah dipenuhi dari 3 (tiga) sumber yaitu :
1). Produksi bahan pangan di Jawa Tengah; 2). Pasokan pangan dari luar Jawa Tengah, dan (3) Cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.

1) Produksi bahan pangan di Jawa Tengah :

a) Produksi Tanaman Pangan

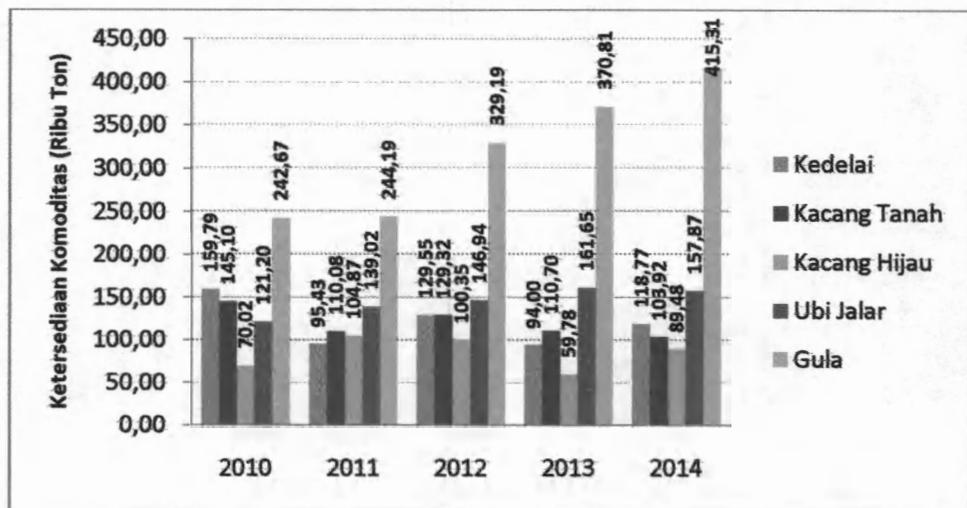
Seiring dengan peningkatan produksi bahan pangan, pertumbuhan ketersediaan komoditas pangan nabati selama Tahun 2010 – 2014 mengalami peningkatan seperti pada Gambar 1 dan 2. Ketersediaan pangan tersebut merupakan produksi pangan Jawa Tengah setelah dikurangi kebutuhan untuk benih, pakan dan susut hasil dari setiap komoditas yang nilai konversinya berbeda untuk masing-masing komoditas.

Produksi padi di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2014 mencapai 9.648.104 ton Gabah Kering Giling/GKG, menurun 6,73% dibandingkan tahun 2013 sebesar 10.344.816 ton; produksi jagung sebesar 3.051.516 ton meningkat 4,11% dari Tahun 2013 sebesar 2.930.911 ton; produksi kedelai sebesar 125.467 ton meningkat 26,33% dari tahun 2013 sebesar 99.318 ton. Penurunan produksi komoditas padi karena ada pengaruh iklim dan alih komoditas dari padi ke jagung dan kedelai, sehingga produksi jagung dan kedelai mengalami peningkatan walaupun belum mencapai target produksi jagung sebesar 3.025.216 ton dan produksi kedelai sebesar 139.621 ton. Mengingat semakin tinggi alih fungsi lahan pertanian, maka dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan dilakukan upaya peningkatan produktivitas lahan pertanian.



Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2015

Gambar 2.1
Ketersediaan Padi, Jagung, Ubi Kayu di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2014

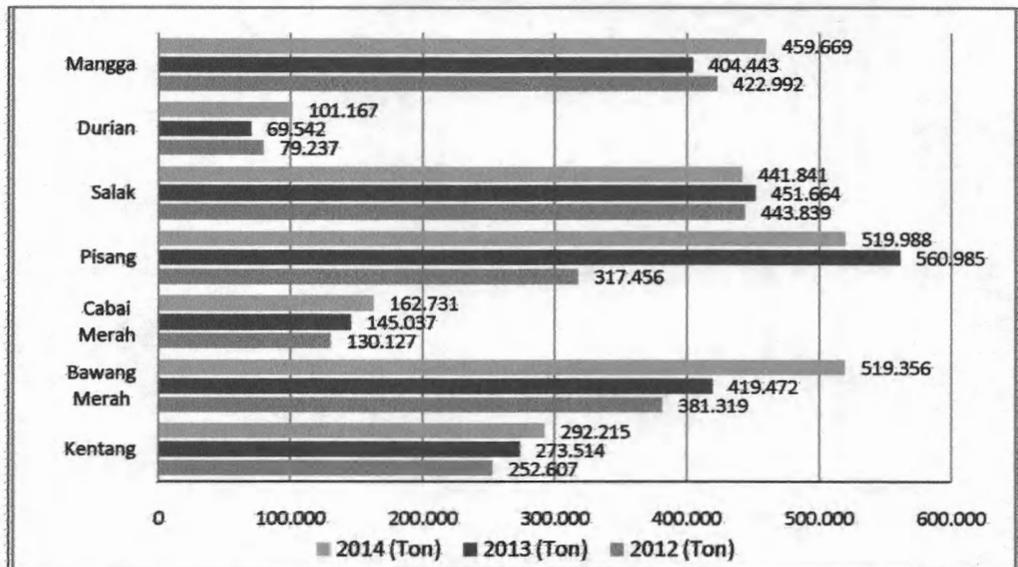


Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2015

Gambar 2.2
Ketersediaan Kedelai, Kacang Hijau, Kacang Tanah, Ubi Jalar dan Gula di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2014

b) Produksi Tanaman Hortikultura

Jawa Tengah sangat potensial untuk pengembangan tanaman hortikultura, kondisi ini didukung dengan agroklimat dan agroekosistem yang sesuai. Produksi tanaman hortikultura di Jawa Tengah menunjukkan bahwa produksi cabai merah dan bawang merah sebanyak 162.731 ton dan 519.356 ton pada tahun 2014, meningkat dari Tahun 2013 sebanyak 145.037 ton dan 419.472 ton. Untuk komoditas kentang sebanyak 275.691 ton lebih rendah dari target 288.826 ton, namun meningkat dari tahun 2013 sebanyak 273.514 ton. Perkembangan produksi tanaman hortikultura di Jawa Tengah Tahun 2012-2014 dapat dilihat pada Gambar 2.3.

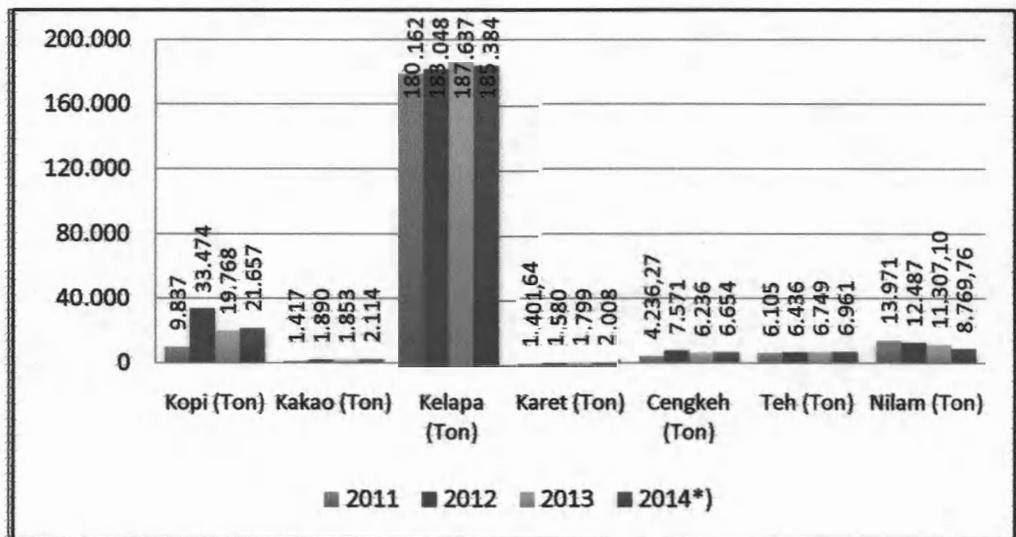


Sumber : Angka Tetap Produksi Holtikultura BPS Jawa tengah, 2015

Gambar 2.3
Perkembangan Produksi Tanaman Hortikultura Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2014 (Ton)

c) Produksi Hasil Perkebunan

Produksi perkebunan komoditas utama tanaman pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2014 yang terdiri dari tebu, kelapa, kopi, kakao, teh, cengkeh, dan nilam disajikan dalam Gambar 2.4.

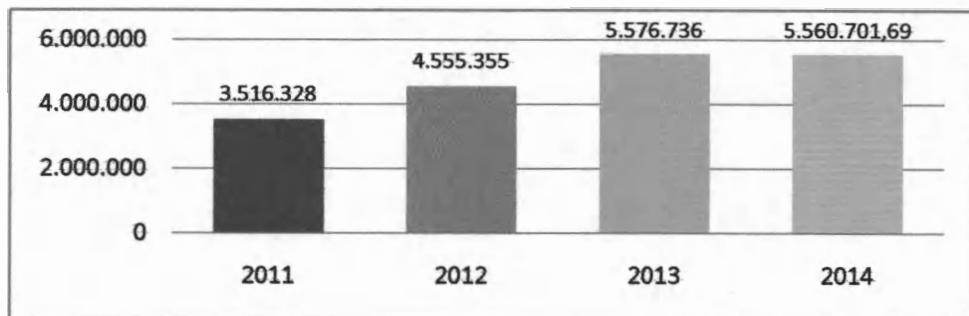


Sumber : Statistik Perkebunan tahun 2012, 2013, dan 2014

Gambar 2.4
Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan untuk Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014 (Ton)

Dalam kurun waktu Tahun 2011-2014 perkembangan produksi komoditas unggulan perkebunan Jawa Tengah mengalami peningkatan. Produksi kopi tahun 2014 sebesar 23.548 ton meningkat 3.517 ton (17,56%) dibandingkan produksi Tahun 2013 sebesar 20.031 ton, produksi kakao Tahun 2014 sebesar 1.854 ton meningkat 2 ton (0,11%) dibandingkan produksi Tahun 2013 sebesar 1.852 ton, produksi kelapa tahun 2014 sebesar 184.360 ton meningkat 1.332 ton (0,73%) dibandingkan produksi tahun 2013 sebesar 183.028 ton, produksi karet tahun 2014 sebesar 2.030 ton meningkat 231 ton (12,84%) dibandingkan

produksi Tahun 2013 sebesar 1.799 ton, produksi cengkeh Tahun 2014 sebesar 6.850 ton meningkat 615 ton (9,86%) dibandingkan produksi Tahun 2013 sebesar 6.235 ton, produksi teh Tahun 2014 sebesar 7.399 ton meningkat 650 ton (9,63%) dibandingkan produksi Tahun 2013 sebesar 6.749 ton. Sedangkan produksi tebu dapat dilihat pada Gambar 2.5.



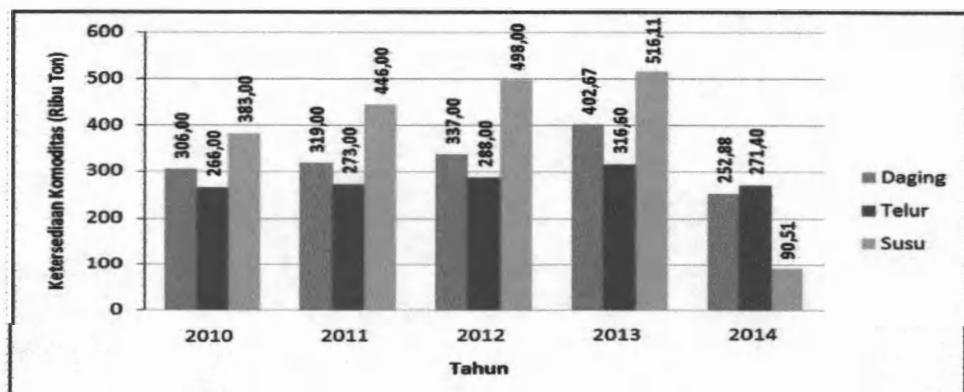
Sumber : Dinas Perkebunan Prov. Jateng, 2015

Gambar 2.5
Perkembangan Produksi Tanaman Tebu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014 (Ton)

Pada Tahun 2014 produksi tebu sebesar 5.560.701,69 ton melebihi dari target RPJMD Provinsi Jawa Tengah sebesar 5.125.500 ton, produksi gula sebesar 373.679,15 ton naik 0,01% dibanding capaian tahun 2013 sebesar 370.814 ton. Pengembangan tebu di Jawa Tengah dilaksanakan melalui bongkar ratoon seluas 1.594 ha, rawat ratoon seluas 7.560 ha, dan ekstensifikasi seluas 836 ha, pengembangan Kebun Bibit Datar (KBD) seluas 492,5 ha, bantuan alat mesin meliputi bantuan traktor, *cultivator*, *grab loader*, alat tebang tebu, alat putus akar yang didukung oleh anggaran yang berasal dari APBD dan APBN Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

d) Produksi Peternakan

Produksi hasil peternakan di Jawa Tengah pada Tahun 2014 mengalami peningkatan jika dibandingkan Tahun 2013. Produksi daging sebesar 265.763.919 kg meningkat 1,22%, produksi susu sebesar 98.493.787 liter meningkat 0,94%, dan produksi telur 274.425.616 kg menurun 3,47%. Perkembangan produksi hasil ternak di Jawa Tengah Tahun 2010–2014 dapat dilihat pada Gambar 2.6.



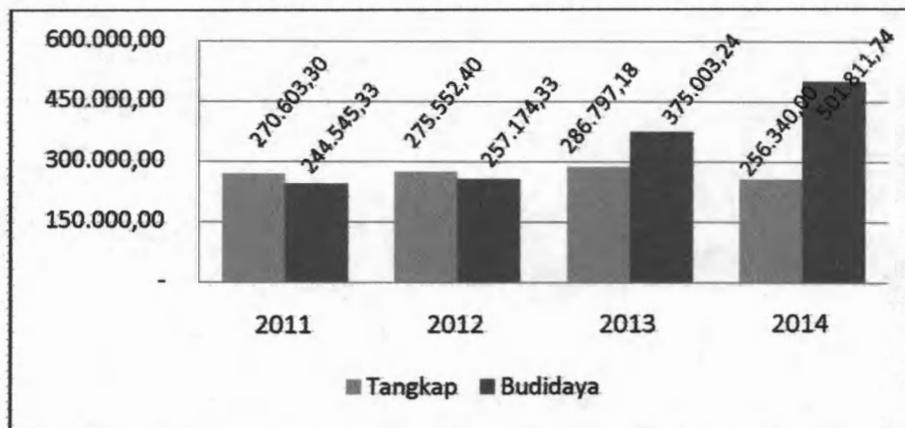
Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, 2015

Gambar 2.6
Perkembangan Produksi Daging, Telur dan Susu di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2014

Guna mengoptimalkan pencapaian 2 (dua) tujuan pembangunan peternakan yaitu peningkatan penyediaan pangan hewani yang ASUH dan kesejahteraan masyarakat, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melengkapi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dengan 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis (UPTD)/Balai, yaitu BIB yang berfungsi menghasilkan benih (semen beku) untuk keperluan inseminasi buatan, BPBTR yang berfungsi menghasilkan bibit dan bakalan ternak sapi potong, sapi perah, kambing dan BAH berupa susu sapi dan kambing, BPBTNR yang berfungsi menghasilkan bibit ternak ayam, itik, kelinci serta produk hasil ternak berupa ayam siap potong dan telur (ayam dan itik), Bapel Keswan yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan hewan melalui pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, Bapel Kesmavet yang berfungsi melakukan pengujian BAH dan HABAH agar aman dikonsumsi masyarakat, BPSDMNak yang berfungsi menyelenggarakan kursus dan pelatihan bagi masyarakat guna peningkatan kualitas SDM peternak.

e) Produksi Perikanan

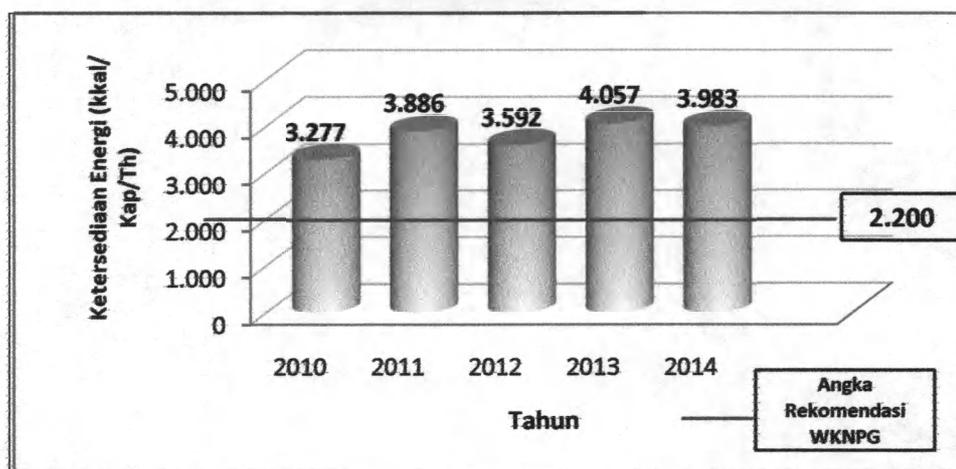
Provinsi Jawa Tengah memiliki panjang garis pantai 791,73 km, dengan rincian pantai utara 502,69 km dan pantai selatan 289,04 km. Potensi perikanan laut cukup besar, yang tersebar di sebanyak 17 kabupaten/kota. Dalam kurun waktu lima tahun produksi perikanan tangkap meningkat dari sebanyak 231.119,20 Ton pada Tahun 2010 menjadi sebanyak 256.340 Ton pada tahun 2014. Sedangkan produksi perikanan budidaya dalam kurun waktu lima tahun menunjukkan peningkatan dari sebesar 189.949,40 ton pada Tahun 2010 menjadi sebesar 501.811,74 ton pada Tahun 2014. Selengkapnya disajikan dalam Gambar 2.7.



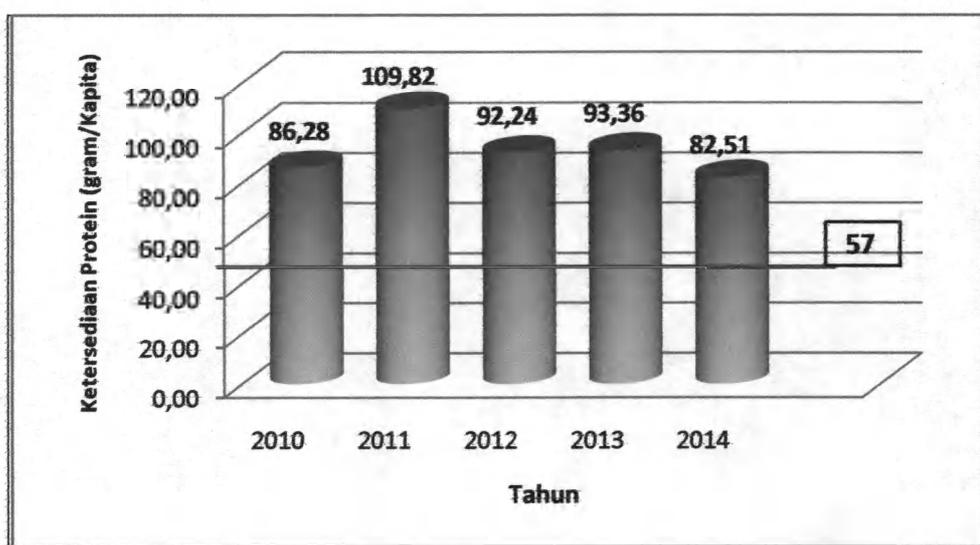
Sumber: Dinas Perikanan Provinsi Jawa Tengah, diolah.

Gambar 2.7
Perkembangan Produksi Perikanan di Jawa Tengah Tahun 2011-2014 (Ton)

Selanjutnya, ketersediaan pangan wilayah disajikan dalam Neraca Bahan Makanan (NBM), menggambarkan secara menyeluruh tentang situasi pengadaan/penyediaan pangan (*food supply*) dan penggunaan pangan (*food utilization*) hingga ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk pada suatu wilayah (Negara/Provinsi/ Kabupaten / Kota) dalam suatu kurun waktu tertentu (satu tahun). Berdasarkan hasil analisis NBM Jawa Tengah dari Tahun 2010 – 2014, perkembangan ketersediaan energi dan protein perkapita dapat dilihat pada Gambar 2.8 dan 2.9.



Gambar 2.8
Ketersediaan Energi Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010-2014 (kcal/kap/th)



Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2015

Gambar 2.9.
Ketersediaan Protein Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2014
(gram/kapita/hari)

Dari neraca pada Gambar 2.9 diketahui bahwa ketersediaan energi naik rata-rata 5,57% dan ketersediaan protein naik rata-rata 0,22%. Pada periode tersebut capaian ketersediaan energi dan protein telah melebihi angka rekomendasi hasil Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) VIII Tahun 2004, yaitu ketersediaan energi 2.200 kkal/kapita/hari dan ketersediaan protein 57 gram/kapita/hari. Meskipun demikian, ketersediaan pangan di Jawa Tengah tetap harus dijaga untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan.

Untuk mewujudkan kemandirian pangan masyarakat di desa dilaksanakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan. Pengembangan Desa Mandiri Pangan dari tahun 2006-2014 sebanyak 305 desa. Distribusi bahan pangan tersedia bagi semua konsumen, meskipun wilayah sentra produksi berbeda dengan wilayah pasar dan sentra konsumen. Untuk mendukung distribusi bahan pangan dilakukan antara lain melalui penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) atau Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Tujuan program ini untuk memberdayakan masyarakat, khususnya masyarakat miskin agar dapat memanfaatkan potensi yang ada guna memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.

Pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan diupayakan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman, berbasis sumber daya lokal, melalui pemberdayaan kelompok wanita tani, optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan sosialisasi serta promosi penganekaragaman pangan. Program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sampai dengan Tahun 2014 sebanyak 1.739 desa/kelompok.

2) Pasokan Pangan dari Luar Jawa Tengah,

Sebagai provinsi yang memiliki lahan pertanian yang subur, Jawa Tengah mampu menyediakan kebutuhan pangan bagi penduduknya, namun demikian apabila terjadi kekurangan bahan pangan di dalam daerah yang dikarenakan bencana atau lainnya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan lintas wilayah serta mendatangkan bahan pangan dari luar daerah (impor) untuk menjaga kestabilan dan meratanya distribusi pasokan pangan.

3) Cadangan pangan Pemerintah dan Masyarakat

Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Jawa Tengah dilakukan dengan meningkatkan volume Pengadaan dan upaya Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di gudang CPP.

Kinerja capaian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir yaitu: Tahun 2015 sebanyak 263,72 ton GKG yang setara beras sebanyak 158,23 ton; Tahun 2014 sebanyak 251,30 ton GKG yang setara beras sebanyak 150,78 ton; Tahun 2013 sebanyak 190,01 ton GKG yang setara beras sebanyak 113,05 ton.

Selanjutnya untuk cadangan Pangan Masyarakat dilakukan dengan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemandirian pangan melalui pengembangan jejaring pembelian dan penjualan gabah/beras LDPM dan pengembangan kemitraan usaha antar pelaku usaha.

Perwujudan ketahanan pangan dimulai dari pemenuhan pangan di wilayah terkecil yaitu pedesaan sebagai basis kegiatan pertanian. Basis pembangunan pedesaan bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam suatu wilayah yang mempunyai keterpaduan sarana dan prasarana dari aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan untuk mencukupi dan mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga. Desa merupakan salah satu *entry point* untuk masuknya berbagai program yang mendukung terwujudnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga yang secara kumulatif akan mendukung terwujudnya ketahanan pangan di tingkat kabupaten/kota, propinsi, dan nasional.

Upaya penanggulangan pemberdayaan masyarakat perdesaan dilakukan melalui Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan dengan pemberdayaan gapoktan dalam wadah Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM). Melalui program ini diharapkan masyarakat desa mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pengembangan ekonominya sehingga dapat menjalani kerja produktif, secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui suatu proses penguatan kelembagaan dan pendampingan yang berkelanjutan dengan menerapkan prinsip memfasilitasi masyarakat untuk menolong diri mereka

sendiri dan berlandaskan pada upaya peningkatan kemampuan Gapoktan baik tahap penumbuhan, pengembangan dan mandiri dalam menghasilkan pendapatan sehingga mereka mampu mempunyai akses terhadap sumberdaya, permodalan, teknologi dan pasar, serta dapat mengantisipasi kondisi paceklik melalui pengelolaan cadangan pangan di desa termasuk pengembangan bisnis murni unit usaha gapoktan.

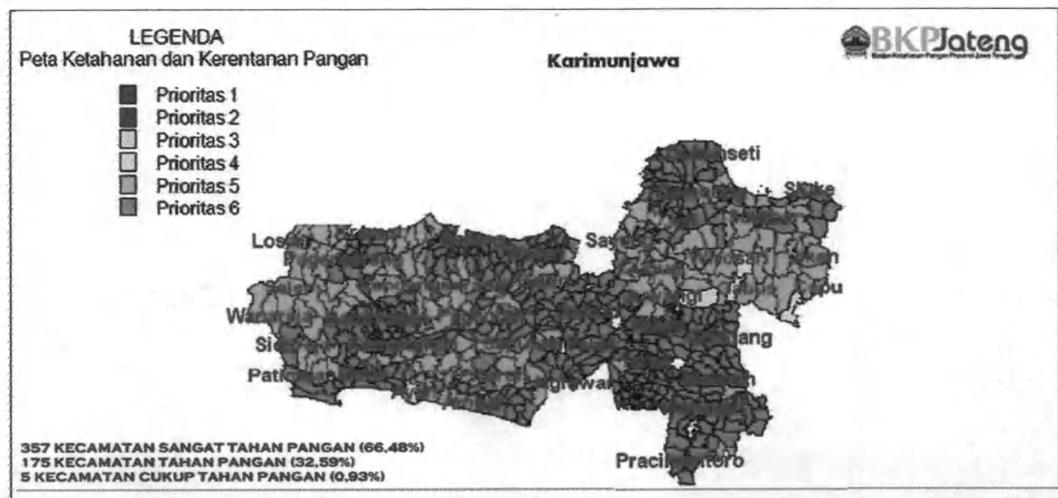
Sedangkan dalam rangka menjalankan subsistem distribusi pangan, salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah pembinaan Gapoktan melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat. Kelembagaan masyarakat (gapoktan) yang memiliki potensi ekonomi di desa dan potensi produksi gabah/beras pertahunnya, masyarakat desa/petani gapoktan dihadapkan pada harga jual gabah yang rendah saat panen, tidak terdapatnya peluang penyimpanan gabah/beras sebagai cadangan pangan masyarakat/anggota gapoktan terutama menghadapi musim paceklik.

Kinerja yang telah dicapai selama 3 tahun terakhir adalah fasilitasi pengembangan tunda jual sebanyak 174 gapoktan dengan perincian per tahun 58 gapoktan.

b. Pengembangan Sistem Distribusi dan Akses Pangan serta Stabilitas Harga Pangan

Untuk melihat kondisi ketahanan pangan di Jawa Tengah dapat mendasarkan *database* Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*FSVA*) Tahun 2014 (Gambar 2.10) dan *database* Ketersediaan Pangan tahun 2015 (Gambar 2.11), Akses Pangan tahun 2015 (Gambar 2.12), dan Pemanfaatan Pangan tahun 2015 (Gambar 2.13).

Kerawanan pangan wilayah adalah kondisi di mana pada wilayah tersebut sebagian rumah tangga penduduknya tidak dapat memenuhi 70 % kecukupan energi dan protein untuk pertumbuhan fisiologis normal. Dengan demikian wilayah berkecukupan pangan masih mempunyai potensi rumah tangga yang penduduknya rawan pangan. Penyebab utama terjadinya kerawanan pangan di Provinsi Jawa Tengah diindikasikan dengan masih banyaknya penduduk miskin dan rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap listrik. Dengan demikian kerawanan pangan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah bukan disebabkan ketersediaan pangan yang tidak memadai.



Sumber : BKP Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.10
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

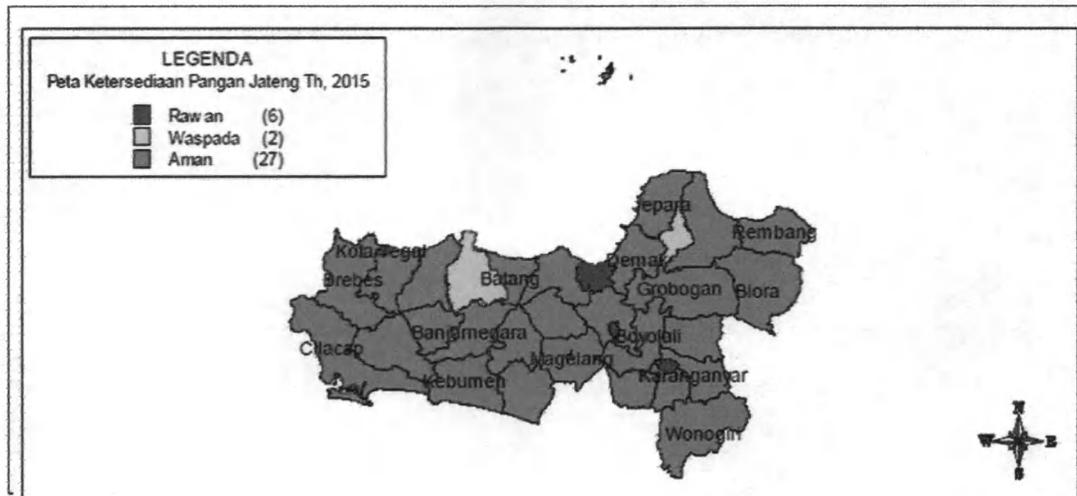
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan menggunakan 13 indikator yang tersedia di tingkat kabupaten yang mampu mengukur berbagai aspek ketahanan pangan dan gizi, antara lain: rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih per kapita, penduduk dibawah garis kemiskinan, rumah tanpa akses listrik, desa tanpa akses jalan, perempuan buta huruf, Angka Harapan Hidup, berat badan balita, akses rumah tangga dengan fasilitas kesehatan, akses air bersih pada rumah tangga, deforestasi hutan, persentase daerah puso, kejadian bencana alam dan fluktuasi curah hujan.

Indikator-indikator Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan tersebut terdiri dari dua kelompok indikator: kerawanan pangan dan gizi kronis serta kerawanan pangan transien. Indikator transien menjelaskan faktor iklim dan lingkungan yang mempengaruhi kerawanan pangan dari aspek ketersediaan dan akses pangan. Sedangkan kerawanan pangan kronis, indikator untuk mengukur ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan pangan. Sembilan indikator yang terkait dengan kerawanan pangan kronis kemudian digabungkan menjadi satu indikator komposit untuk menjelaskan secara keseluruhan kondisi ketahanan pangan suatu kabupaten serta memberi peringkat atas tingkat prioritas dari masing-masing kabupaten.

Prevalensi ketahanan pangan didasarkan pada Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA). Kerentanan terhadap kerawanan pangan ditentukan berdasarkan sembilan indikator yang terkait dengan ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan dan gizi. Peta ini diproduksi dengan menggabungkan sembilan indikator menjadi suatu indeks ketahanan pangan komposit.

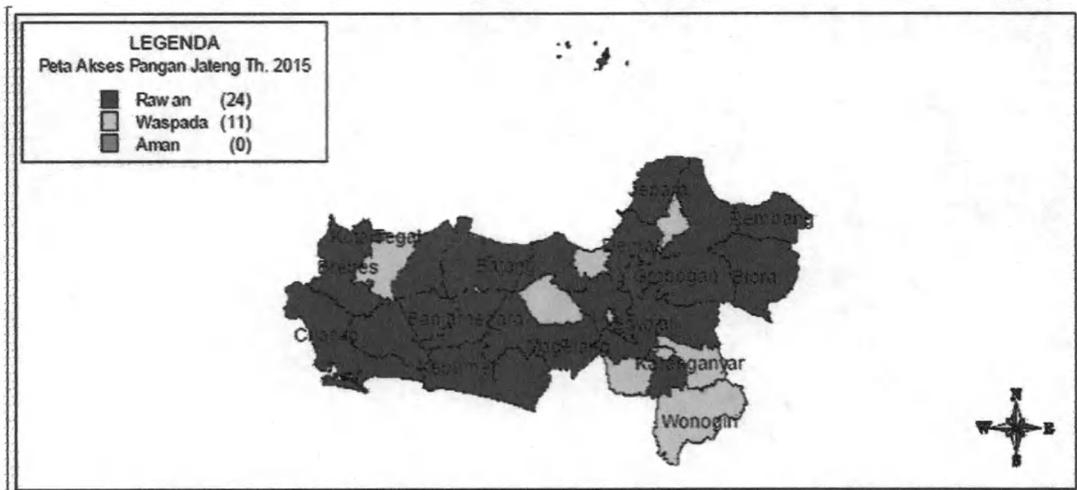
Penanganan daerah rawan pangan sebagai salah satu upaya pengurangan kemiskinan telah dilaksanakan dengan program Desa Mandiri Pangan dan Revitalisasi lumbung pangan masyarakat di daerah yang mengalami defisit pangan pada saat masa tanam atau berpotensi rawan pangan/miskin. Untuk meningkatkan kemampuan antisipasi kondisi rawan pangan dan penanganan rawan pangan dilakukan melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) serta intervensi melalui Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP). Tahun 2014 capaian persentase penanganan daerah rawan pangan di Jawa Tengah sebesar 56,25% dan meningkat dari capaian Tahun 2013 sebesar 51,85%.

Daerah-daerah yang berwarna merah menunjukkan ketahanan pangan yang kurang jika dibandingkan dengan daerah-daerah yang berwarna hijau. Peta ini menunjukkan prevalensi kerawanan pangan di tingkat kabupaten dan perlu dicatat bahwa tidak semua keluarga yang hidup dalam kabupaten berwarna merah tua (prioritas 1) tergolong rawan pangan, dan sebaliknya bahwa tidak semua keluarga yang hidup di kabupaten yang berwarna hijau (prioritas 6) berarti tahan pangan.



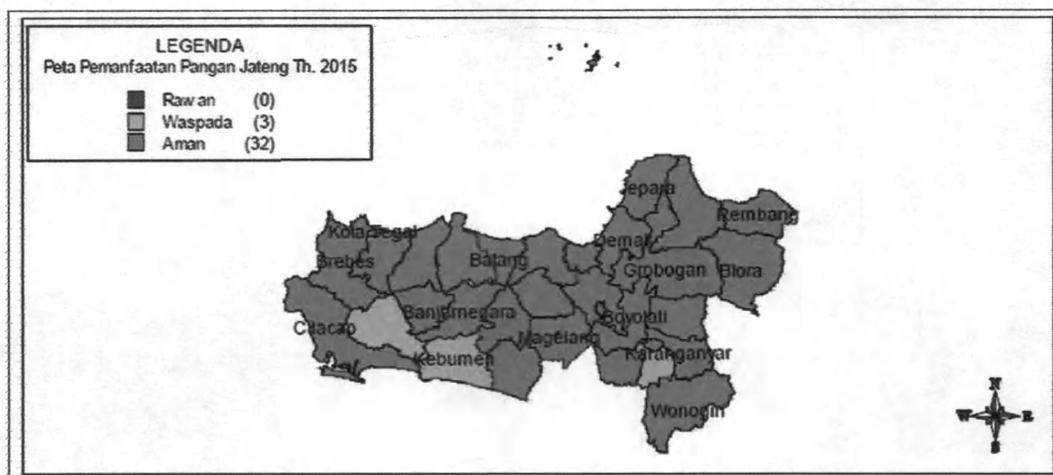
Sumber : BKP Provinsi Jawa Tengah, 2015

Gambar 2.11
Peta Ketersediaan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015



Sumber : BKP Provinsi Jawa Tengah, 2015

Gambar 2.12
Peta Akses Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015



Sumber : BKP Provinsi Jawa Tengah, 2015

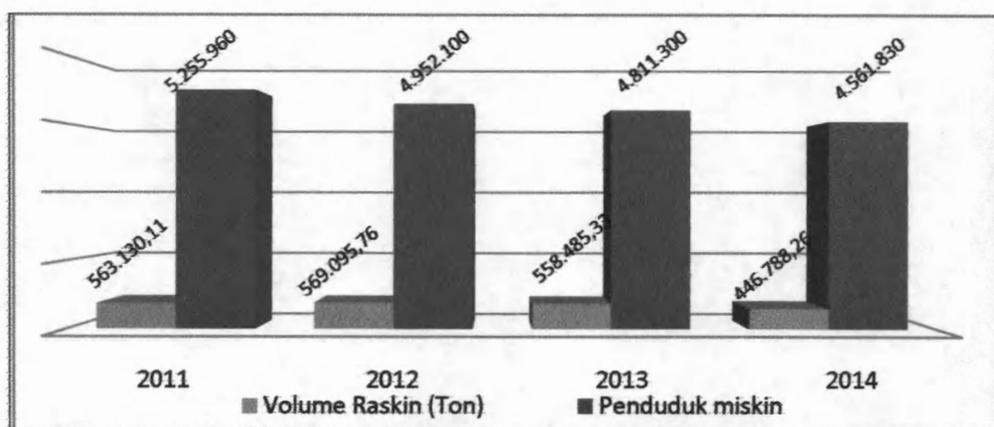
Gambar 2.13
Peta Pemanfaatan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

Berdasarkan analisis SKPG tahun 2015, kondisi pangan dan gizi Jawa Tengah Tahun 2014 secara makro rawan, hanya 5 kabupaten aman yaitu kabupaten Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Temanggung, Tegal dan 1 kabupaten dalam status waspada adalah Kudus. Selebihnya 29 kabupaten/kota pada status rawan. Secara rinci per aspek sebagai berikut :

- 1) Aspek Ketersediaan pangan untuk 27 kabupaten se Jawa Tengah dalam kondisi aman, 2 kabupaten kondisi waspada dan 6 kota pada kondisi rawan. Hal ini dikarenakan daerah perkotaan bukan merupakan sentra produksi pangan. Namun hal ini tidak menjadi kendala karena komoditas pangan tersedia cukup dan dapat diakses oleh warga perkotaan.
- 2) Aspek Akses pangan untuk 11 kabupaten/kota se Jawa Tengah dalam kondisi waspada dan 24 kabupaten pada kondisi rawan. Hal ini dikarenakan jumlah KK miskin di Jawa Tengah masih tinggi.
- 3) Aspek Pemanfaatan pangan untuk 32 kabupaten/kota se Jawa Tengah dalam kondisi aman dan 3 kabupaten/kota dalam kondisi waspada.

Harga pangan utama/strategis di Jawa Tengah kurun waktu 2011-2014 relatif stabil sepanjang waktu dan terjangkau masyarakat secara umum. Kenaikan harga pangan sebesar 10-15% yang masih dalam batas kewajaran, terjadi hanya pada saat-saat tertentu, seperti pada saat hari-hari besar keagamaan, hari-hari besar nasional dan pada musim hajatan masyarakat.

Peningkatan akses pangan bagi rumah tangga miskin telah dilakukan melalui berbagai program di antaranya : Padat karya pangan dan subsidi/bantuan pangan dari pemerintah berupa Beras Bersubsidi (Raskin) untuk rumah tangga yang berpendapatan di bawah garis kemiskinan. Penyediaan dan penyaluran Raskin untuk RTS dilakukan oleh BULOG (Gambar 10).



Sumber data: BULOG Divre Jawa Tengah

Gambar 2.14
Perkembangan Penyaluran Raskin Tahun 2011-2014

Kebijakan lain untuk stabilisasi harga adalah pengembangan cadangan pangan yang dimiliki pemerintah. Selain digunakan untuk operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga, CBP juga digunakan untuk mengatasi kekurangan pangan yang terjadi sebagai akibat bencana alam.

Berdasarkan Pergub Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pergub Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Pergub Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,

Pengembangan cadangan pangan di Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan membentuk Balai Pengembangan Cadangan Pangan dibawah koordinasi Badan Ketahanan Pangan.

Cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Badan Pengembangan Cadangan Pangan (BPCP) pada tahun 2014 sebanyak 333,493 ton gabah setara 200,480 ton beras, lebih besar dari target sebesar 150 Ton Ekuivalen Beras, meningkat dari tahun 2013 sebesar 167,825 Ton Ekuivalen Beras (83,93%) dan Tahun 2012 sebanyak 141,894 Ton Ekuivalen Beras (70,95%). Persentase capaian cadangan pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 sebesar 100,24% sudah melebihi target SPM. Pada tahun 2014 telah terdistribusikan untuk penanganan kerawanan pangan transien sebesar 136.930 kg GKG setara 77.500 kg beras sehingga sisa stok awal tahun 2015 sebesar 196.563 kg GKG setara 117.938 kg beras.

Sedangkan cadangan pangan yang telah dikelola oleh Perum BULOG Divre Jawa Tengah yaitu dengan pengadaan pangan (beras) pada tahun 2012 adalah 779,983 ton, tahun 2013 sebesar 710,551 ton, dan tahun 2014 sebesar 3,689 ton (sampai dengan Pebruari 2014).

Untuk meningkatkan cadangan pangan dan menjamin stabilitas harga pangan di masyarakat telah dikembangkan lumbung pangan. Fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah dalam bentuk pembangunan fisik lumbung, lantai jemur, peralatan, pengisian cadangan pangan dan penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan. Lumbung pangan di Jawa Tengah setiap tahun telah direvitalisasi. Sampai dengan tahun 2014, lumbung pangan yang telah direvitalisasi sejumlah 415 lumbung. Secara keseluruhan sampai dengan tahun 2014 dengan memberikan bantuan stimulan gabah, renovasi lumbung/pembuatan lantai jemur dan alat (timbangan, tes kadar air, gerobag dorong).

c. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif yang dapat dilihat melalui skor PPH.

Kualitas konsumsi pangan masyarakat Jawa Tengah semakin baik yang ditunjukkan dengan meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH merupakan salah satu indikator keberhasilan ketahanan pangan di Jawa Tengah dari aspek konsumsi. PPH Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 mencapai angka 91,78 lebih tinggi dibanding tahun 2012 dengan skor PPH 89,87 dan tahun 2013 dengan skor 90,35.

**Tabel 2.1
Skor Pola Pangan Harapan Jawa Tengah Tahun 2014**

No.	Kelompok Pangan	Standar	Tahun			
			2011	2012	2013	2014
1	Padi-padian	25,0	25,00	25,00	25,00	25,00
2	Umbi-umbian	2,5	2,40	2,50	2,19	2,21
3	Pangan Hewani	24,0	17,88	17,85	17,62	17,96
4	Minyak & lemak	5,0	4,95	5,00	3,91	5,00
5	Buah/biji berminyak	1,0	0,97	1,00	0,79	1,00

No.	Kelompok Pangan	Standar	Tahun			
			2011	2012	2013	2014
6	Kacang-kacangan	10,0	10,00	10,00	10,00	10,00
7	Gula	2,5	2,27	2,48	1,78	1,79
8	Sayur & buah	30,0	25,18	26,00	29,06	28,82
9	Lain-lain	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Skor PPH Jateng		100,0	88,66	89,87	90,35	91,78
Skor PPH Nasional			77,3	75,4	88,3	81,8

Sumber : BKP Provinsi Jawa Tengah, 2015

Mengacu pada konsumsi energi ideal yang diperlukan bagi setiap individu untuk dapat hidup sehat, konsumsi beras, minyak dan lemak penduduk Jawa Tengah perlu diturunkan. Namun demikian, konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, sayur dan buah masih perlu ditingkatkan. Perkembangan capaian konsumsi per kelompok pangan dan capaian konsumsi energi per kapita/hari dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan 4.

Tabel 2.2
Konsumsi Kelompok Pangan di Jawa Tengah Tahun 2011-2014 (kkal/kap/hari)

No.	Indikator	Tahun			
		2011	2012	2013	2014
1	Beras (Kg/Kap/Th)	102,48	90,49	89,49	88,54
2	Umbi-umbian (Kg/Kap/Th)	27,52	32,31	24,24	24,80
3	Pangan hewani (Kg/Kap/Th)	38,44	37,21	36,19	38,53
4	Sayur dan buah (Kg/Kap/Th)	76,57	73,98	67,70	67,10

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2015

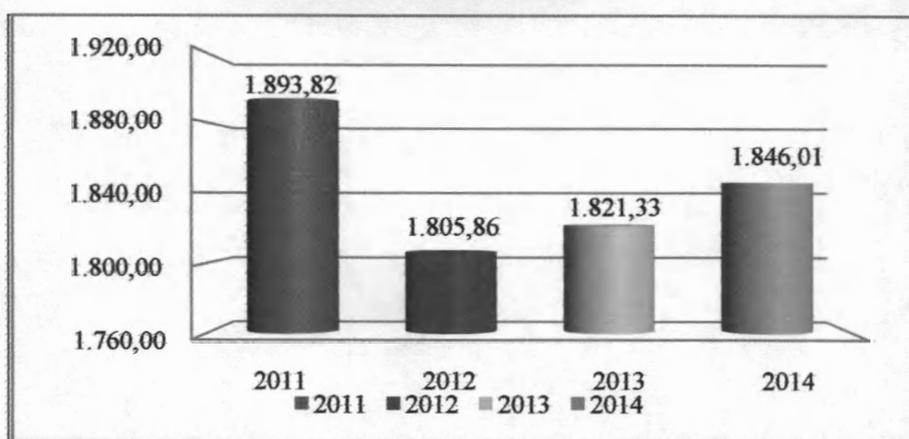
Tabel 2.3.
Konsumsi Energi di Jawa Tengah Tahun 2011-2014 (kkal/kap/hari)

No.	Kelompok Pangan	Ideal	Tahun			
			2011	2012	2013	2014
1	Padi-padian	1000	1.094,80	1.033,02	1.003,10	1.001,12
2	Umbi-umbian	120	100,51	118,89	87,71	88,28
3	Pangan Hewani	240	178,80	178,52	176,21	179,59
4	Minyak & lemak	200	188,10	200,18	156,48	256,65
5	Buah/biji berminyak	60	37,90	40,15	31,55	54,85
6	Kacang-kacangan	100	137,60	158,99	261,15	223,45
7	Gula	100	97,80	99,24	71,20	71,61
8	Sayur & buah	120	100,70	104,12	116,25	115,29
9	Lain-lain	60	67,30	69,29	101,50	13,66
JUMLAH		2000	2.015	2.003,51	2.005,14	2.004,50

Sumber : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2015

Pada tahun 2014 konsumsi energi penduduk sebesar 2.004,5 kkal/kap/hari. Sedangkan konsumsi protein tahun 2014 sebesar 52,7 gr/kap/hari naik dari tahun 2012 sebesar 51,22 gr/kap/hari dan tahun 2013 sebesar 51,74 gr/kap/hari dengan kelompok pangan yang perlu ditingkatkan adalah umbi-umbian, buah, sayur serta pangan hewani seperti daging, telur dan ikan.

Angka rata-rata asupan energi penduduk di Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.15.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2015

Gambar 2.15
Asupan Energi Penduduk Jawa Tengah Tahun 2011-2014 (kal/org/hari)

d. Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Penyuluhan merupakan salah satu bagian dalam proses pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang menjadi acuan dalam penyusunan program di tingkat Kabupaten/Kota agar terintegrasi dan terfokus. Pada tahun 2014 Jawa Tengah memiliki Balai Penyuluhan dan Posludes sebanyak 531 Unit dari 573 kecamatan, dengan total tenaga penyuluh sejumlah 5.582 orang terdiri dari penyuluh PNS sejumlah 2.997 orang, penyuluh pertanian sebanyak 2.126 orang, penyuluh perikanan 279 orang, penyuluh kehutanan sebanyak 592 orang dan THL-TBPP sebanyak 2.585 orang. Dari jumlah penyuluh tersebut, persentase penyuluh yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahlian mencapai 40,50%.

Adapun status pencapaian pembangunan pilar aksesibilitas pangan beragam disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Capaian Pilar Peningkatan Aksesibilitas Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

NO	Program/Kegiatan	ACUAN DASAR	DATA TAHUN 2015		TARGET 2015	STA TUS	SUM BER
			SEMESTER 1	SEMESTER 2			
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN							
1	Kegiatan Program Aksi DMP						
a	Jumlah DMP yang sudah mandiri (desa)	14	45	52	44	●	BKP
b	Jumlah DMP yang dikembangkan (desa)	144	285	327	422	▼	
2	Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Provinsi Jawa Tengah						
a	Jumlah cadangan pangan pemerintah (Provinsi 200 ton)	110 ton GKG	251 ton GKG	265 ton GKG	435 ton GKG	▼	BKP
3	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan						
a	Jumlah wilayah rawan pangan yang tertangani oleh PDRP (desa)	31	120	54	50	●	BKP
b	Tersedianya peta ketahanan dan kerawanan pangan (FSVA)	29 kab	565 Kec	537 Kec	8.577 desa/kel	▼	
c	Persentase kab/kota yang melaksanakan surveilen pangan dan gizi (SKPG)	50%	100%	100%	100%	●	
4	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan						
a	Lembaga Distribusi Pangan (LDPM) di daerah produsen pangan	24	58	58	228	▼	BKP
b	Tersedianya data dan informasi	35	35	35	35	●	

NO	Program/Kegiatan	ACUAN DASAR	DATA TAHUN 2015		TARGET 2015	STA TUS	SUM BER
			SEMESTER 1	SEMESTER 2			
1	2	3	4	5	6	7	8
	tentang distribusi, harga dan akses pangan (kab/kota)						
c	Terlaksananya pemantauan dan pemantapan distribusi, harga dan akses pangan (kab/kota)	35	35	35	35	●	
5	Analisis Ketersediaan Pangan						
a	Mempertahankan ketersediaan energi per kapita minimal 2.200 (kkal/kap/hari)	3.277	4.467	3.881	3.479	●	BKP
b	Tersedianya protein minimal 57 (gr/kap/hr)	86,28	88,18	93,86	91,59	●	
6	Kegiatan Peningkatan Produksi & Produktivitas Tanaman Pangan						
a	- Pengemb. Padi Non Hibrida (Ha)	2.500	0	4.383	18.000	▼	Dinper tan TPH
b	- Pengemb. Jagung Hibrida (Ha)	1.100	0	3.020	4.000	▼	
c	- Pengemb. Jagung Komposit (Ha)	0	0	182	520	▼	
7	Kegiatan pengembangan budidaya ternak perah, sapi potong/kerbau, kambing/domba						
a	Pengembangan budidaya ternak Perah (kelompok)	4	0	12	49	▼	Dinnak Keswan
b	Pengembangan Budidaya ternak sapi potong/kerbau (kelompok)	15	0	15	418	▼	
c	Pengembangan Budidaya ternak kambing/domba (kelompok)	29	0	20	135	▼	
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI							
1	Kegiatan Fasilitasi Lumbung Pangan Masyarakat						
a	Jumlah lumbung pangan masyarakat yang direvitalisasi (lumbung)	186	-	455	516	▼	BKP
2	Kegiatan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (orang)						
a	SL-Demplot (Unit)	10	18	73	50	●	Set Bakor-luh
PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN							
1	Kegiatan Penanganan Sertifikasi dan Pelabelan serta Pengawasan BMR Buah dan Sayur Segar						
a	Jumlah sertifikasi prima dan pendaftaran pangan segar	10 sertifikasi dan 6 PSAT	45 Sertifikasi dan 59 PSAT	56 sertifikasi dan 21 PSAT	21 sertifikasi dan 10 PSAT	●	BKP
PROGRAM PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI DAN POLA KONSUMSI							
1	Kegiatan pengembangan diversifikasi konsumsi dan penganekaragaman pangan						
a	Skor PPH	86,02	-	91,78	95	▼	BKP
b	Jumlah Desa P2KP (desa)	250	-	533	750	▼	
c	Jumlah kab/kota yang melaksanakan promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan (kab/kota)	21	35	35	35	●	
d	Penyediaan tenaga/petugas lapangan/penyuluh (Pendampingan P2KP)	241	-	428	457	▼	
e	Terlaksananya pemantauan dan penganekaragaman konsumsi dan kewan pangan (kab/kota)	35	35	35	35	●	
f	Tersedianya data dan informasi tentang pola konsumsi penganekaragaman dan keamanan pangan (kab/kota)	35	35	35	35	●	

NO	Program/Kegiatan	ACUAN DASAR	DATA TAHUN 2015		TARGET 2015	STA TUS	SUM BER	
			SEMESTER 1	SEMESTER 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	
PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS								
1	Kegiatan Peningkatan Produksi Ternak dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal							
A	Optimalisasi IB dan INKA (akseptor)	347.000	167.464	452.513	405.000	●	Dinnak Keswan	
b	Peningkatan Produksi semen beku, melalui optimalisasi Balai Inseminasi Buatan (BIB):							
	Sapi (straw)	179.841	274.936	501.571	410.000	●	Dinnak Keswan	
	Kambing (straw)	18.078	15.924	32.621	50.000	▼		
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PERKEBUNAN								
1	Kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim							
a	Pengembangan areal produksi tebu (Ha)	55.652	3.446,25	58.978,85	71.000	▼	Din bun	
b	Produksi tebu (ton)	3.710,25	224.072,08	4.710.650,76	5.170.650	▼		
c	Produksi Gula Provinsi (ton)	281.705	15.004,49	267.799,67	411.594	▼		
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK TANAMAN BUAH BERKELANJUTAN								
1	Perbaikan mutu pengelolaan kebun tanaman buah							
a	Luas areal perbaikan mutu pengelolaan kebun tanaman buah (ha)	215	0	354	748	▼	Dinper tan TPH	
2	Perbaikan mutu pengelolaan pasca panen tanaman buah							
a	Luas areal perbaikan mutu pengelolaan pasca panen tanaman buah (ha)	1.456	-	364 unit	3.206	▼	Dinper tan TPH	
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK TANAMAN BUAH SAYURAN DAN OBAT BERKELANJUTAN								
1	Kegiatan peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk tanaman sayuran dan tanaman obat berkelanjutan							
a	Luas areal pengembangan kaw. Tan sayuran dan tan obat (ha)						Dinper tan TPH	
	Sayuran (Ha)	40	0	471	91	●		
	Obat (Ha)	30	0	236	83	●		
b	Luas areal pengembangan registrasi lahan usaha tan sayuran dan tan obat (ha)		15 LU	210	174			
	Sayuran (Ha)	40	0	33,34	91	●		
	Obat (Ha)	30	0	11,73	83	●		
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU PRODUK TANAMAN KACANG DAN UMBI BERKELANJUTAN								
1	Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman aneka kacang & umbi							
a	- SL-PTT Kedelai (ha)	38.200	0	39.250	58.900	▼	Dinper tan TPH	
PROGRAM PENCAPAIAN SWASEMBADA DAGING SAPI DAN PENINGKATAN PENYEDIAAN PANGAN HEWANI YANG AMAN, SEHAT UTUH DAN HALAL (ASUH)								
1	Kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternakan Melalui LM3 dan SMD							
A	Pengembangan Agribisnis Peternakan Melalui LM3 dan SMD	LM3 = 90 klp		10	57	▼	Dinnak Keswan	
		SMD = 79 org		16	50	▼		
2	Kegiatan Pengembangan Budidaya Perunggasan							
a	Pengembangan Budidaya Perunggasan (kelompok)	9	66	27	31	●	Dinnak Keswan	
3	Kegiatan Pengembangan Budidaya Aneka Ternak							

NO	Program/Kegiatan	ACUAN DASAR	DATA TAHUN 2015		TARGET 2015	STA TUS	SUM BER
			SEMESTER 1	SEMESTER 2			
1	2	3	4	5	6	7	8
a	Pengembangan Budidaya Aneka Ternak (kelompok)	2	22	-	8	●	Dinnak Keswan
PROGRAM PERIKANAN TANGKAP							
1	Kegiatan Pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap						
a	Jumlah produksi perikanan laut tangkap (ton)	212.635	-	253.251	194.557	●	DKP
b	Jumlah produksi perikanan umum daratan tangkap (ton)	18.484	-	235.553,30	20.287	●	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA							
1	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya						
a	Volume produksi (ton)	189.949	-	309.949,63	260.579	●	DKP
PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOHAN DAN PEMASARAN PRODUK PERIKANAN							
1	Kegiatan Peningkatan daya saing produk perikanan						
a	Jumlah rata-rata konsumsi ikan per kapita provinsi (kg/kap/th)	12,93		20,92	14,54	●	DKP

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari berdasarkan capaian tahun 2015, dari 49 indikator pada Pilar II Aksesibilitas Pangan Beragam, terdapat 24 indikator yang tidak tercapai dan 25 indikator yang sudah tercapai. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, masih banyak indikator yang belum mampu mencapai target pada tahun 2015.

Target yang belum tercapai antara lain : Jumlah DMP yang dikembangkan; jumlah cadangan pangan pemerintah; tersedianya peta ketahanan dan kerawanan pangan (FSVA); Lembaga Distribusi Pangan (LDPM) di daerah produsen pangan; pengembangan padi non hibrida; pengembangan jagung hibrida; pengembangan Jagung Komposit; pengembangan budidaya ternak perah; pengembangan budidaya ternak sapi potong/kerbau; pengembangan budidaya ternak kambing/domba; jumlah lumbung pangan masyarakat yang direvitalisasi; kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; skor PPH; jumlah Desa P2KP; penyediaan tenaga/petugas lapangan/penyuluh (Pendampingan P2KP); peningkatan produksi semen beku kambing; pengembangan areal produksi tebu; produksi tebu; produksi gula provinsi; luas areal perbaikan mutu pengelolaan kebun tanaman buah; luas areal perbaikan mutu pengelolaan pasca panen tanaman buah; SL-PTT kedelai, pengembangan agribisnis peternakan melalui LM3 dan SMD.

2 Gizi

Ditinjau dari kondisi tingkat kecukupan gizi masyarakat di Jawa Tengah masih terdapat anak balita yang mengalami masalah gizi, antara lain: Berat badan rendah, gizi kurang/buruk, pendek/sangat pendek (*stunting*), dan gizi lebih.

Indikasi stunting salah satunya bisa diketahui dari berat badan dan panjang badan bayi baru lahir. Anak dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yakni kurang dari 2500 gram dan panjang badan kurang dari 48 cm, berpotensi stunting. Agar anak tidak stunting, tidak terkena penyakit degeneratif dini, maupun terkena gizi buruk dan kurang gizi, berat badan bayi baru lahir minimal 3000 gram dengan panjang 50 cm.

Balita memerlukan gizi yang memadai sejak 1000 hari pertama kehidupannya, yakni sejak di dalam kandungan hingga usia 2 (dua) tahun. Sehingga, pasca memberi gizi yang baik saat ada dalam kandungan dan memberi ASI eksklusif, ibu juga harus memperhatikan masa MPASI (makanan pendamping ASI).

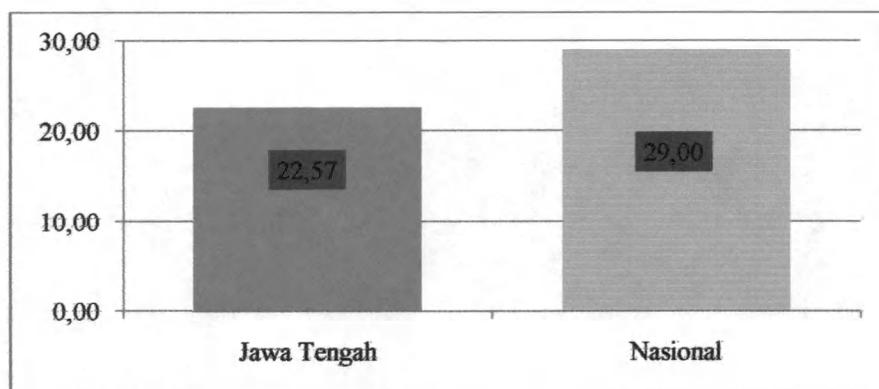
Permasalahan gizi terutama terjadi pada kelompok masyarakat miskin di perdesaan. Kecukupan gizi masyarakat dipengaruhi oleh konsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta dapat memenuhi kecukupan gizi individu untuk tumbuh dan berkembang. Kekurangan gizi pada masa kehamilan dan anak usia dini menyebabkan keterlambatan dalam pertumbuhan fisik, perkembangan motorik atau kemampuan gerak dan gangguan perkembangan kognitif yang pada jangka panjang berakibat pada rendahnya kemampuan belajar.

Gambaran tentang kondisi umum masalah gizi masyarakat meliputi :

a Prevalensi Pendek (*stunting*) pada Anak Balita di Provinsi Jawa Tengah dibandingkan Nasional.

Di Tahun 2014, berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi di 496 Kabupaten/Kota dengan melibatkan 165.000 Balita sebagai sampelnya, angka *stunting* menurun menjadi 29% dibanding dengan tahun 2013 sebesar 37,2%. Hasil ini diperkuat juga dengan data UNICEF yang melakukan intervensi selama tiga tahun sejak Tahun 2011-2014 di tiga Kabupaten di Indonesia (Sikka, Jayawijaya, Klaten) dan berhasil menurunkan angka *stunting* sebesar 6%.

Kondisi prevalensi *stunting* pada anak balita di Jawa Tengah berdasarkan data Pemantauan Status Gizi (PSG) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah adalah 22,57% dari jumlah balita di Jawa Tengah pada tahun 2014 atau sejumlah 2.460 jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa apabila dibandingkan dengan rata-rata Nasional Tahun 2014 sebesar 29,0%, kondisi di Jawa Tengah masih lebih baik.



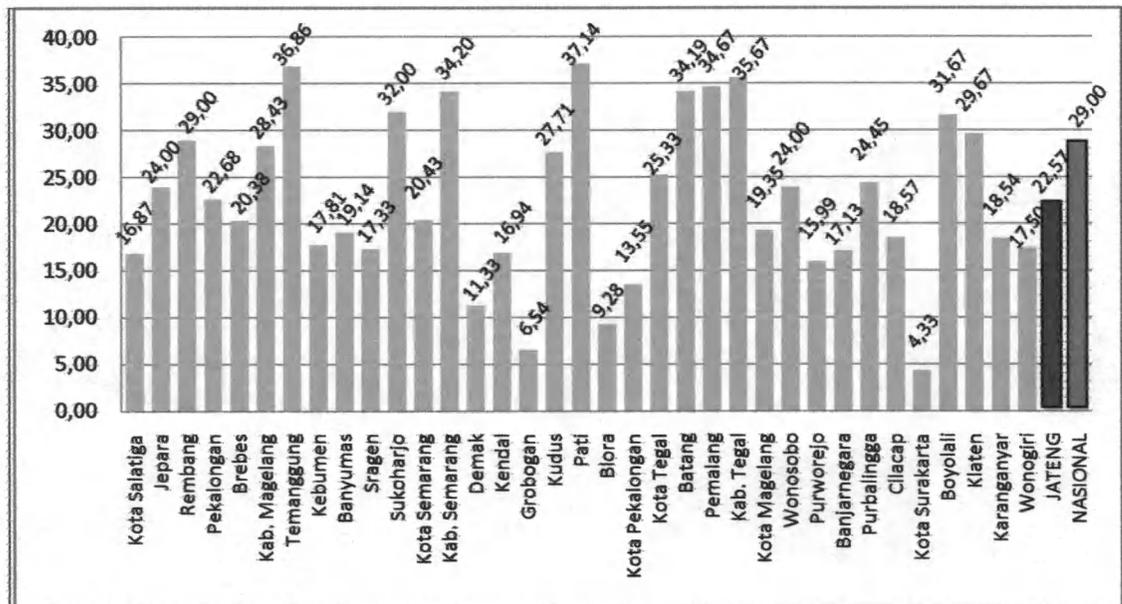
Sumber : PSG Kadarzi Jateng, 2014

Gambar 2.16
Perbandingan Prevalensi *Stunting*
di Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional Tahun 2014 (%)

b Prevalensi Pendek (*Stunting*) pada Anak Balita Per Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah

Secara keseluruhan prevalensi *stunting*/pendek balita di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan data PSG Dinkes Provinsi Jateng 2014 sebesar 22,57% sudah di bawah target MDGs sebesar 32% (Gambar 2.17).

Kabupaten/Kota dengan kondisi kurang baik atau tertinggi angka prevalensi pendek dan sangat pendek yaitu di Kabupaten Pati sebesar 37,14% dikarenakan minimnya pengetahuan tentang pola pangan beragam, bergizi, berimbang sehat dan aman yang antara lain ditunjukkan rendahnya angka rata-rata konsumsi energi. Sedangkan prevalensi pendek dan sangat pendek terendah di Kota Magelang sebesar 4,33%. Upaya penanggulangan masalah balita *stunting* terintegrasi dalam kegiatan perbaikan gizi pada masa kehamilan, penerapan ASI Eksklusif dan pemberian makanan pendamping ASI pada balita.



Sumber : PSG Kadarzi Jateng, 2014

Gambar 2.17
Prevalensi *stunting* Anak Balita per Kabupaten/Kota Dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014 (%)

Tiga belas Kabupaten/Kota dengan prevalensi kependekan total sama dengan atau di atas target *MDGs* meliputi : Pati, Temanggung, Kabupaten Tegal, Pemalang, Kabupaten Semarang, Batang, dan Sukoharjo.

Indikator Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) menggambarkan status gizi yang sifatnya kronis, artinya muncul sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama, seperti : kemiskinan, rendahnya asupan pada ibu hamil, pola asuh yang tidak tepat, sering menderita penyakit secara berulang karena higiene dan sanitasi yang kurang baik. Kategori status gizi anak balita berdasarkan TB/U adalah Normal, Pendek, dan Sangat Pendek. Status gizi Pendek dan Sangat Pendek dikelompokkan lagi menjadi satu kategori yang disebut *stunting/pendek*. Kondisi pendek ini juga akan berpengaruh terhadap kecerdasan seseorang.

c Prevalensi Gizi Kurang dan Buruk pada Anak Balita (Indeks BB/TB) di Provinsi Jawa Tengah dibandingkan Nasional

Indikator Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) menggambarkan status gizi yang sifatnya akut sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung dalam waktu pendek karena diare atau sakit lainnya. Dalam keadaan demikian berat badan anak akan cepat turun sehingga tidak proporsional lagi dengan tinggi badan dan anak menjadi kurus.

Penemuan kasus gizi buruk berdasarkan indikator BB/TB dilakukan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

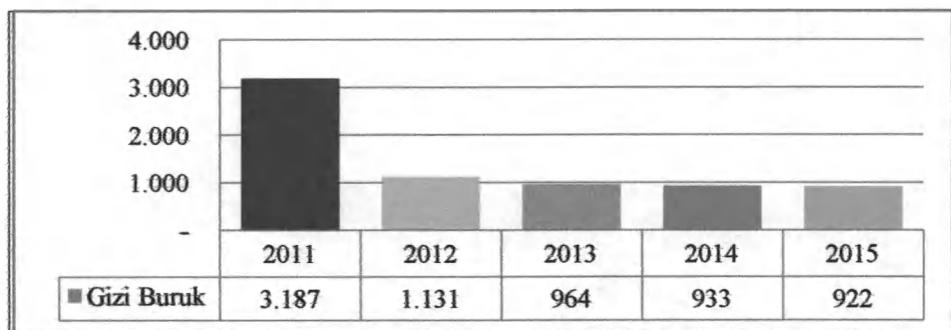
1) Pemantauan Kasus Gizi Buruk.

Pelaksanaan pemantauan kasus gizi buruk terintegrasi dalam kegiatan pemantauan pertumbuhan di Posyandu. Pemantauan gizi buruk menghasilkan jumlah kasus gizi buruk sebagaimana terlihat pada Gambar 13. Persentase posyandu yang memiliki sarana dan prasarana pemantauan pertumbuhan hingga tahun 2015 sebanyak 75% dari 48.615 posyandu, yang artinya belum mencapai target 80% pada tahun 2015. Selain itu juga melalui peran aktif kader dengan dukungan teknis petugas kesehatan di Puskesmas dan PKD. Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) Tahun 2015 mencapai 73,9%. Anak balita yang dalam penimbangan di Posyandu plot BB-nya pada KMS berada di bawah garis merah, dilakukan pengukuran kembali Berat badan (BB) dan Tinggi badan (TB) dan dibandingkan dengan Baku Standar WHO, 2006 (WHO Antro 2007). Apabila hasil perhitungan berada di bawah -3 Standar Baku maka balita tersebut termasuk kategori berstatus Gizi Buruk. Pengukuran juga dilakukan pada anak balita yang ditemukan nampak kurus sekali di luar pelaksanaan Posyandu. Anak balita dengan tanda klinis *marasmus* dan *kwashiorkor* juga termasuk kategori berstatus Gizi Buruk. Presentase balita gizi buruk dari Tahun 2011-2014 mengalami penurunan dari angka 0,15 persen di Tahun 2011 menjadi 0,03 persen di tahun 2014.

2) Penanganan Kasus Gizi Buruk.

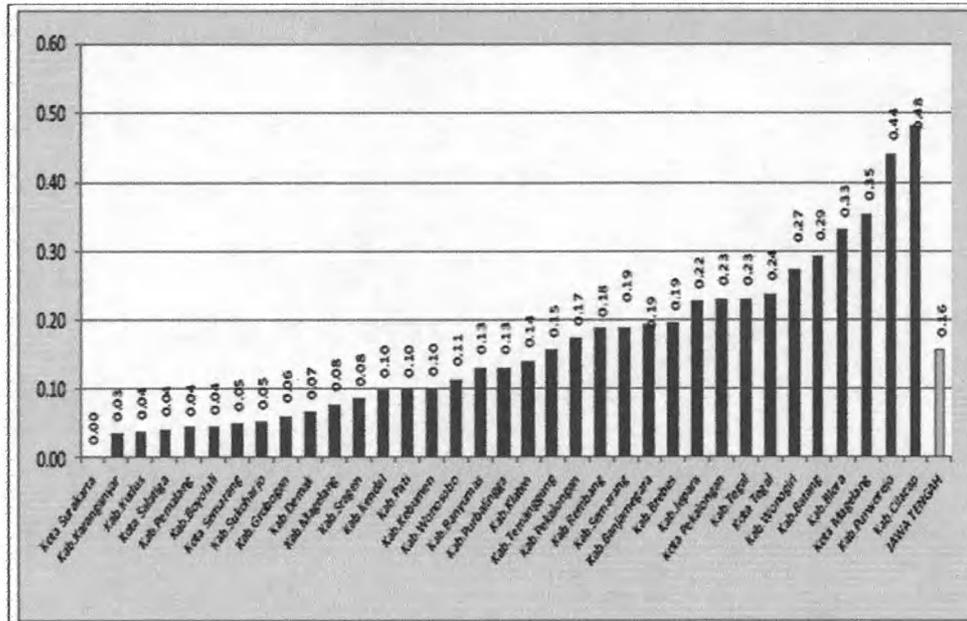
Posyandu sebagai pos pelayanan kesehatan yang terdepan menjadi ujung tombak dalam penjangkaran masalah kekurangan gizi pada balita. Kasus anak balita yang ditemukan menderita gizi buruk dirujuk ke Puskesmas dan/atau ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.

Nampak dari Gambar 2.18 terjadi penurunan jumlah kasus balita gizi buruk pada kurun waktu Tahun 2011-2015. Berdasarkan hasil pengumpulan data selama Tahun 2014, jumlah kasus gizi buruk dengan indikator berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) sebanyak 964 kasus dan pada Tahun 2015, jumlah kasus gizi buruk di Jawa Tengah Tahun 2015 sebanyak 922 kasus. Hingga akhir Tahun 2015, seluruh (100%) kasus balita gizi buruk di Jawa Tengah telah mendapat perawatan yang memadai.



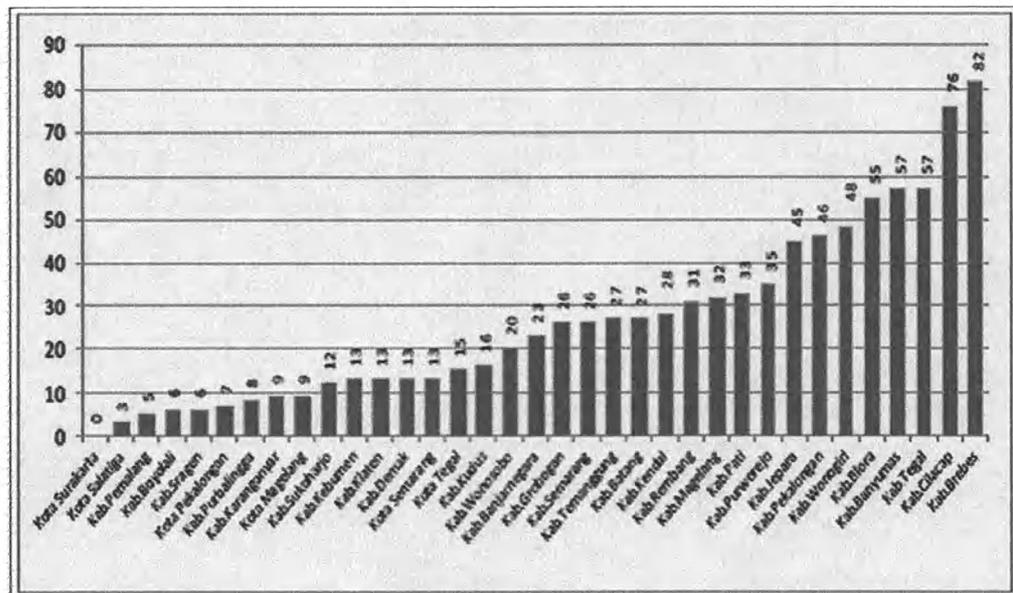
Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2014 dan 2015, diolah

Gambar 2.18
Penurunan Kasus Gizi Buruk Anak Balita (Indeks BB/TB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015 (Kasus)



Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2014

Gambar 2.19
Prevalensi Gizi Buruk Anak Balita (Indeks BB/TB) per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014



Sumber : Profil Kesehatan Kabupaten/Kota Tahun 2015

Gambar 2.20.
Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

Upaya yang telah dilakukan dalam perbaikan gizi masyarakat, utamanya penurunan gizi kurang dan buruk pada anak balita melalui Usaha Perbaikan Gizi Keluarga, Penentuan status gizi oleh Tenaga Pelaksana Gizi dibantu Bidan desa, pelatihan kader dan masyarakat secara intensif serta penanganan responsif terhadap balita penderita gizi buruk.

Status pencapaian pembangunan pilar gizi masyarakat dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Status Pencapaian Pembangunan Pilar Gizi Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

No.	Program/Kegiatan	ACUAN DASAR (2010)	CAPAIAN TAHUN 2015		TARGET RAD - PG 2015	STATUS	SUMBER
			SEMESTER 1	SEMESTER 2			
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Program Perbaikan Gizi Masyarakat						
1	Kegiatan Usaha Perbaikan Gizi Keluarga						
a	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	75%	80,6%	81%	90%	▼	Dinkes
b	Jumlah puskesmas non perawatan memiliki tenaga yang telah dilatih tata laksana gizi buruk.	35	576	576	576 (100%)	●	Dinkes
c	Jumlah puskesmas perawatan yang memiliki alat dapur dan sarana melaksanakan tatalaksana gizi buruk	130	264	264	290 (100%)	▼	Dinkes
d	Persentase kasus gizi buruk paska perawatan yang didampingi oleh kader	60%	100%	100%	100%	●	Dinkes
e	Persentase posyandu dengan pelatihan ulang kader.	0	60%	60%	60%	●	Dinkes
f	Persentase posyandu yang dilakukan pembinaan kader.	50%	99%	99%	100%	▼	Baper masdes
g	Jumlah posyandu yang memiliki sarana dan prasarana pemantauan pertumbuhan	10%	75%	75%	80%	▼	Dinkes
h	Jumlah posyandu yang memperoleh dana operasional	7.754	48.510	48.510	500	●	Baper masdes
i	Integrasi PAUD, BKB dan Posyandu (Pengembangan Posyandu Model)	500	275	525	1.000	▼	Baper masdes
j	Persentase balita 6-59 bulan mendapat kapsul vitamin A	95%	99,0%	99,5%	95%	●	Dinkes
k	Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif	60%	60,7%	60,7%	80%	▼	Dinkes
l	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan sesuai standar	100%	100%	100%	100%	●	Dinkes
m	Persentase Kader Posyandu Aktif	88%	92,7%	93%	94%	▼	Dinkes
n	Persentase Kab/ Kota yang mempunyai peraturan tentang ASI Eksklusif	3%	86%	86%	60%	●	Dinkes
2	Kegiatan Penanggulangan GAKI						
a	Cakupan rumah tangga yang mengonsumsi garam beryodium	70%	93,5%	93,5%	90%	●	Dinkes
3	Kegiatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi						
a	Jumlah kasus gizi buruk yang memperoleh obat gizi buruk	3.468 kasus	933 (100%)	912 (100%)	3.468 (100%)	●	Dinkes
b	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan surveillance gizi khusus	0	35	35	35	●	Dinkes
4	Kegiatan Upaya Perbaikan Gizi di Institusi						
a	Jumlah puskesmas perawatan dan RSUD memiliki tenaga yang dilatih tata laksana gizi buruk	182	334	334	332 (100%)	●	Dinkes

No.	Program/Kegiatan	ACUAN DASAR (2010)	CAPAIAN TAHUN 2015		TARGET RAD - PG 2015	STATUS	SUMBER
			SEMESTER 1	SEMESTER 2			
1	2	3	4	5	6	7	8
b	Jumlah puskesmas, yang telah dilatih dengan pemantauan pertumbuhan balita	52	875	875 (100%)	901 (100%)	●	Dinkes
5	Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak						
a	Cakupan ibu hamil mendapat tablet tambah darah (Fe) sebanyak 90 tablet	71%	93%	92,52%	85%	●	Dinkes
b	Cakupan kunjungan pertama Neonatus (KN1)	95%	99%	98,16%	90%	●	Dinkes
c	Cakupan kunjungan ke-empat ibu hamil (K4)	92%	93%	97,55%	100%	▼	Dinkes

Berdasarkan Tabel 2.5 dapat dilihat bahwa dari berdasarkan capaian tahun 2015, dari 22 indikator terdapat 8 indikator yang tidak tercapai dan 14 indikator yang sudah tercapai. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, masih banyak indikator yang belum mampu mencapai target pada Tahun 2015.

Target yang belum tercapai yaitu : Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S); Jumlah puskesmas perawatan yang memiliki alat dapur dan sarana melaksanakan tatalaksana gizi buruk; Persentase posyandu yang dilakukan pembinaan kader; Jumlah posyandu yang memiliki sarana dan prasarana pemantauan pertumbuhan; Integrasi PAUD, BKB dan Posyandu (Pengembangan Posyandu Model); Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif; Persentase Kader Posyandu Aktif; Cakupan kunjungan ke-empat ibu hamil (K4).

B. Tantangan dan Hambatan

Tantangan dan Hambatan langsung maupun tidak langsung dalam Pencapaian Tujuan Pembangunan Pangan dan Gizi di Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Perbaikan Gizi Masyarakat

a Tantangan gizi dapat terbagi menjadi dua program sebagai berikut :

1) Spesifik Gizi

a) **Masalah gizi bersifat antar-generasi dan akibat yang ditimbulkannya bersifat trans-generasi.** Artinya status gizi pada umur tertentu dipengaruhi oleh status gizi pada umur sebelumnya, artinya status gizi anak berusia 5 tahun dipengaruhi oleh status gizi pada umur yang lebih muda, yang selanjutnya dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan bayi di dalam kandungan. Pertumbuhan dan perkembangan bayi di dalam kandungan ibu dipengaruhi oleh status gizi ibu sebelum dan selama masa kehamilan. Dengan demikian status gizi anak berusia 5 tahun merupakan hasil dari proses pertumbuhan dan perkembangan sebelumnya, yang dipengaruhi oleh status gizi ibu pra-nikah (remaja putri), pra-hamil, selama hamil, dan usia dini bayi pasca lahir. Oleh karena itu, mengatasi *stunting* pada anak balita, tidak cukup hanya pada periode setelah periode 1000 HPK, tetapi harus secara komprehensif, termasuk remaja putri sebagai calon ibu. Oleh karena masalah gizi berkesinambungan dan lintas generasi, maka penanganannya tidak bisa terfragmentasi, memerlukan sinergitas dan koordinasi yang memadai.

- b) Indonesia sudah dihadapkan pada **beban ganda masalah gizi**, yaitu gizi kurang dan *stunting* yang prevalensinya masih tinggi, dan gizi lebih yang prevalensinya semakin tinggi. Beban ganda tersebut tidak hanya berimplikasi pada status gizi tetapi juga terhadap penyakit. Penyebab kematian utama di Indonesia telah bergeser dari penyakit infeksi ke penyakit tidak menular (PTM). Selain itu, masalah PTM tidak hanya akibat dari masalah gaya hidup, tetapi merupakan akibat dari salah gizi pada usia 1000 HPK dan pra-kehamilan. Oleh karenanya, penanganannya semakin kompleks.
- c) **Masih rendahnya pengetahuan, dan kesadaran gizi masyarakat akan pentingnya gizi**, menyebabkan kurang memadainya pola asuh keluarga. Hal ini dikarenakan kurangnya cakupan komunikasi dan edukasi gizi secara berkelanjutan untuk mempromosikan perilaku gizi dan kesehatan yang benar, seperti pemberian ASI eksklusif untuk bayi 0-6 bulan dan pola pemberian MP-ASI pada bayi dan anak usia dini. Pendidikan dan penyuluhan kesehatan dan gizi perlu dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan yang memerlukan peran aktif berbagai pemangku kepentingan. Di sisi lain, rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pangan yang aman perlu diperhatikan sehingga makanan yang dikonsumsi tidak menimbulkan potensi penyakit.
- d) **Rendahnya konsumsi buah dan sayur, tingginya konsumsi garam dan makanan tinggi lemak serta rendahnya aktivitas fisik** pada sebagian masyarakat, terutama di perkotaan, yang meningkatkan angka berat badan lebih dan obesitas. Diketahui 93,5 persen masyarakat Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. Sementara itu, data Riskesdas tahun 2013 menunjukkan sebagian besar masyarakat berperilaku konsumsi berisiko yaitu mengonsumsi bumbu penyedap (77,3 persen), makanan dan minuman manis (53,1 persen), dan makanan berlemak (40,7 persen).
- e) **Masih kurang optimalnya akses terhadap sumber air minum dan air bersih, dan lingkungan yang sehat.** Penyakit infeksi merupakan salah satu penyebab langsung gizi kurang, selain asupan makanan yang tidak memadai. Penyakit infeksi, terutama pada anak-anak, sangat dipengaruhi oleh pola hidup bersih dan sehat. Rendahnya sanitasi akibat keterbatasan fasilitas serta sarana prasarana untuk mengakses air bersih dan perilaku buang air di sungai mengakibatkan kesehatan lingkungan belum terpenuhi secara merata terutama di daerah perdesaan. Keadaan ini menyebabkan masih tingginya prevalensi penyakit infeksi sehingga mendorong timbulnya masalah gizi. Telah terbukti bahwa ada korelasi antara sanitasi dan lingkungan yang kurang baik dengan prevalensi *stunting* pada balita. Kondisi di atas juga berimbas pada kurang optimalnya akses masyarakat terhadap pangan yang aman, yang akhirnya akan menyebabkan munculnya penyakit akibat pangan (*foodborne diseases*) yang bersifat infeksius sebagai salah satu penyebab masalah gizi dan pembentuk sebuah siklus yang mengakibatkan penurunan status kesehatan dan peningkatan kematian.
- f) **Masih terdapat kesenjangan status gizi balita antar kabupaten/kota** menjadi tantangan yang harus dihadapi Jawa Tengah. Hal ini ditandai dengan masih lebih banyaknya anak balita di pedesaan yang kekurangan gizi dibanding di perkotaan. Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita yang tinggi di wilayah pedesaan terkait erat dengan kemiskinan, pendidikan yang rendah dan kesadaran yang harus ditingkatkan agar pola gizi seimbang dapat dipahami dan dilaksanakan masyarakat secara luas.

- g) **Penempatan Tenaga Ahli Gizi** di setiap Kecamatan dengan Kualifikasi minimal S1 Pendidikan Bidang Ilmu Gizi (S.K.M. Gizi atau S.Kes. Gizi, S.Gz. dengan dibantu Tenaga Pelaksana Gizi (D3 Gizi) dan Bidan (D3 Bidan).

2) Sensitif Gizi

- a) **Kendala dalam diversifikasi konsumsi pangan** antara lain : 1) masih rendahnya pendapatan dan daya beli sebagian masyarakat; 2) masih terbatasnya ragam komoditas pangan yang ditunjukkan dengan sumber karbohidrat masyarakat yang masih didominasi oleh beras, 3) akses pangan yang rendah disebabkan oleh kemiskinan, 4) masih melembaganya sikap dan kebiasaan konsumen yang belum mengutamakan kandungan gizi, aman, halal (Bagi Konsumen Muslim) dalam memilih pangan yang dikonsumsi disebabkan oleh rendahnya pendidikan masyarakat terutama ibu atau pengasuh anak dan usia menikah yang terlalu muda. Oleh karena itu, diperlukan adanya Pendidikan Gizi melalui berbagai saluran Mass Media cetak, maupun *daring*, kebijaksanaan harga dan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien kepada para konsumen, insentif pajak bagi Produsen Makanan, Minuman pada Skala Kecil, Menengah, Besar bila memproduksi dengan *Good Manufacturing Practices* dan *Hazzard Analytical Critical Control Points* (HACCP) yang menjamin Pangan Aman, Halal, Bergizi dan mencantumkan *Nutrition Fact* atau *Nutrition Labelling*, Logo Halal pada Produk Kemasan Pangan.
- b) **Sumber daya alam yang sesuai semakin terbatas dan produksi skala kecil** sehingga mengancam terpenuhinya ketersediaan pangan dan berpotensi dilakukannya impor. LP2B. Produksi pangan di Indonesia masih didominasi oleh kelembagaan usaha tani skala kecil dan modal terbatas. Kemampuan petani, nelayan, dan pelaku ekonomi masih terbatas untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Sumber daya alam tersebut, antara lain sumber daya alam lahan kering, rawa dan pasang surut, serta sumber daya pantai dan sumber daya laut. Rendahnya penguasaan teknologi pemuliaan dan makanan ternak serta iptek budi daya perikanan laut dan darat menyebabkan biaya produksi pangan sumber protein masih tinggi. Peningkatan produksi hortikultura dan kacang-kacangan terhambat oleh kurang tersedianya bibit unggul dan masih rendahnya penguasaan budi daya tanaman kedelai. Hal ini juga disebabkan oleh masih terbatasnya kemampuan petani untuk mencegah dan memberantas hama penyakit secara biologis. Ketersediaan sumber makanan kaya protein lainnya, seperti ikan, belum dipromosikan secara luas, demikian pula dengan ketersediannya di tingkat masyarakat belum dilaksanakan secara sistematis.
- c) **Kebijakan dan program terkait perbaikan gizi masih terfragmentasi** akibat kurangnya koordinasi dan belum dilaksanakannya pendekatan multi-sektor. Banyak intervensi spesifik yang berdampak langsung, serta intervensi sensitif dan faktor pemungkin di luar sektor gizi yang mendukung percepatan perbaikan gizi, namun setiap sektor belum mengintegrasikan kegiatan masing-masing sehingga masih bersifat sektoral. Hal ini salah satunya dikarenakan sangat terbatasnya forum yang memfasilitasi koordinasi berkelanjutan dan terstruktur untuk peningkatan perbaikan gizi. Di dalam Jurnal Ilmiah Internasional *The Lancet* (2013) ditekankan pentingnya pendekatan multisektor sebagai pendekatan yang dianggap efektif untuk mengurangi permasalahan gizi. Pernyataan ini dikemukakan berdasarkan pada hasil telaah secara mendalam dari pengalaman pelaksanaan program penanggulangan masalah gizi di banyak

negara di dunia, sehingga merupakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Diketahui bahwa intervensi gizi spesifik saja tidak dapat menyelesaikan masalah gizi tanpa adanya intervensi gizi sensitif dan dukungan lingkungan yang menjadi faktor pemungkin tercapainya perbaikan gizi

b Hambatan:

- 1) Masih terbatasnya jumlah Tenaga khusus Gizi di Puskesmas menjadi faktor kurang optimalnya upaya KIE yang berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat tentang pola gizi seimbang.
- 2) Keterbatasan Tenaga Gizi Puskesmas yang telah dilatih tata laksana gizi buruk dan Posyandu yang belum memiliki sarana prasarana pemantauan pertumbuhan balita masih menjadi kendala dalam upaya perbaikan gizi masyarakat.
- 3) Kurangnya kesadaran ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang, kunjungan kehamilan secara teratur akan berpengaruh pada pertumbuhan bayi yang dilahirkan.
- 4) Masih rendahnya bayi yang mendapat ASI eksklusif juga merupakan faktor yang mempengaruhi kesehatan dan kecukupan gizi balita. Selain itu juga masih kurangnya pemahaman akan pentingnya “1000 Hari Pertama Kelahiran” untuk perkembangan bayi selanjutnya.

2 Peningkatan Aksesibilitas Pangan Beragam

a. Tantangan :

- 1) Ketersediaan pangan di Jawa Tengah ke depan yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, dan penggunaan pangan. Di sisi lain, peningkatan produksi pangan menghadapi ancaman serius, yaitu: (1) alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian; (2) menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan; (3) semakin terbatasnya ketersediaan air untuk produksi pangan akibat kerusakan hutan; dan (4) tingginya kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim dan bencana alam. Di samping itu, pemberdayaan penyuluh swadaya/swasta perlu ditingkatkan untuk mencukupi kebutuhan tenaga penyuluh sehingga dapat menunjang peningkatan produksi pangan.
- 2) Tantangan yang harus dihadapi pada sistem distribusi pangan adalah bagaimana menciptakan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. Bervariasinya kemampuan produksi pangan antar daerah dan antar waktu menjadi tantangan dalam menjamin distribusi pangan agar tetap lancar sampai ke seluruh kabupaten/kota sepanjang waktu.
- 3) Pemenuhan akses pangan masyarakat menghadapi tantangan rendahnya daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan. Rendahnya daya beli masyarakat tidak hanya terjadi di wilayah perdesaan, tetapi juga terjadi di wilayah perkotaan. Tantangan ekonomi lainnya adalah rendahnya sumberdaya yang tersedia di daerah untuk mendorong terciptanya *multiplier effect* yang dapat menciptakan sumber-sumber pendapatan dan mata pencaharian bagi masyarakat. Tantangan lainnya adalah tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga membatasi ruang gerak dalam memperoleh sumber-sumber pendapatan (mata pencaharian).
- 4) Tantangan lain yang masih dihadapi adalah rendahnya kualitas konsumsi pangan sebagaimana dapat diketahui dari skor PPH. Dilihat perbandingan antara capaian PPH dengan PPH ideal, dapat disimpulkan bahwa kecukupan kalori masyarakat Jawa Tengah masih bertumpu pada padi-padian. Jika dilihat dari keragaman jenis

konsumsinya, terlihat bahwa konsumsi pangan hewani masih rendah. Hal ini ironis jika dibandingkan dengan ketersediaan daging, telur dan susu di Jawa Tengah yang telah melebihi jumlah kebutuhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengonsumsi bahan pangan hewani tersebut karena faktor ketidakmampuan dari segi ekonomi karena pendapatan yang rendah. Begitu pula konsumsi sayur-sayuran, umbi-umbian dan kacang-kacangan yang masih kurang ideal. Perlu didapatkan cara bagaimana mengedukasi masyarakat secara terus menerus agar memahami pentingnya keragaman konsumsi pangan dan melaksanakannya dalam penyediaan makanan bagi anggota keluarga bukan lagi dengan slogan “4 Sehat 5 Sempurna”, tetapi dengan Pedoman Gizi Seimbang “Piring Makanku”.

b. Hambatan :

- 1) Permasalahan yang masih dihadapi adalah terbatasnya sarana dan prasarana distribusi pangan sehingga belum mampu menjangkau seluruh wilayah, utamanya desa terpencil, yang pada akhirnya akan menghambat penduduk di desa terpencil tersebut untuk memenuhi kebutuhan pangan yang sesuai dengan gizi seimbang dan skor PPH ideal. Selain itu, distribusi pangan juga masih menghadapi kendala terbatasnya prasarana dan sarana pemasaran, seperti jalan, pasar desa dan fasilitas pergudangan atau penyimpanan pangan.
- 2) Permasalahan yang berhubungan dengan faktor ekonomi yaitu rendahnya pendapatan masyarakat (tingginya angka kemiskinan) yang menyebabkan daya beli terhadap komoditas pangan juga rendah, dan pada akhirnya menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat terhadap pangan jauh dari angka ideal untuk menunjang kehidupan yang sehat. Masalah akses penduduk miskin terhadap pangan ini masih banyak dihadapi penduduk Jawa Tengah, meskipun pada periode tahun 2009 – 2013 jumlah penduduk miskin mengalami kecenderungan menurun dari 5,726 juta orang pada tahun 2009 menjadi 4,561 juta orang pada September 2014. Secara relatif juga terjadi penurunan persentase penduduk miskin dari 17,72 persen pada tahun 2009 menjadi 13,58 persen pada September 2014. Kemiskinan tersebut menyebabkan ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam jumlah, kualitas dan keragaman pangan yang baik. Hal ini berakibat pada kekurangan gizi, baik zat gizi makro maupun mikro, yang dapat diindikasikan dari status gizi kurang dan gizi buruk anak balita dan wanita hamil.
- 3) Permasalahan yang dihadapi yang berhubungan dengan faktor sosial adalah rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan gizi masyarakat yang mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi pangan sehingga tidak mampu memenuhi konsumsi pangan yang seimbang serta Tingkat Kecukupan Gizi yang baik bagi setiap golongan umur dan jenis kelamin. Serta memenuhi keragaman gizi dan Pola Pangan Harapan Ideal (PPH) ideal Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga dipengaruhi oleh adanya pola kebiasaan dan budaya makan masyarakat. Pola kebiasaan makan merupakan cara yang ditempuh seseorang/sekelompok orang untuk memilih makanan dan mengkonsumsinya sebagai reaksi terhadap pengaruh fisiologis, psikologis, budaya dan sosial.

3 Peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

a. Tantangan

- 1) **Era Perdagangan Bebas :** Sistem perdagangan internasional makin membuka peluang produk luar negeri untuk mengisi pasar Indonesia dan bersaing dengan produk lokal dengan kualitas dan harga yang ditawarkan. Tantangan ini dapat memacu pertumbuhan pangan lokal sesuai permintaan pasar. Di sisi lain peningkatan impor bahan dan produk pangan lebih diakibatkan oleh faktor harga, mutu dan persepsi konsumen.
- 2) **Kemajuan Teknologi Produksi :** Kemajuan teknologi produksi pangan yang diprediksi akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, mengakibatkan makin banyaknya jenis pangan dan penggunaan bahan tambahan pangan yang perlu diantisipasi oleh laboratorium pengujian untuk

mengidentifikasi kandungan pada produk pangan baik secara kimia maupun mikrobiologi. Ketertinggalan laboratorium pengujian dalam mengejar teknologi pengujian, membuka celah bocornya risiko kesehatan akibat produk yang berbahaya.

- 3) **Kemajuan Teknologi Promosi :** Kemajuan teknologi promosi atau periklanan digunakan sebagai salah satu pemicu dalam menggugah permintaan masyarakat. Keadaan ini berpotensi pada penggunaan produk secara irasional. Di samping itu kecanggihan teknologi promosi dapat menutupi berbagai kelemahan produk, yang dapat menurunkan tingkat kewaspadaan konsumen yang sudah terpapar oleh dorongan permintaan. Perkembangan kemajuan teknologi promosi merupakan tantangan bagi pemerintah, institusi pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat dalam memberdayakan masyarakat melalui intensifikasi upaya sosialisasi dan KIE agar masyarakat memiliki kemampuan untuk menyaring berbagai informasi.

b. Hambatan :

- 1) Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha di bidang industri rumah tangga pangan terhadap standar mutu dan keamanan pangan
Menjamurnya kelompok industri usaha mikro, kecil, dan menengah pangan membawa risiko kesehatan karena modal dan profesionalisme yang melandasi usaha ini sering tidak memadai untuk menjamin keamanan dan mutu produk pangan. Rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran produsen serta upaya pelaku usaha untuk menyediakan produk pangan yang murah agar dapat dijangkau oleh daya beli masyarakat mengakibatkan mereka melakukan proses produksi dan penyediaan pangan yang tidak layak serta melanggar ketentuan yang berlaku. Hal ini lebih memperparah keadaan apabila produsen makanan tersebut memproduksi makanan anak-anak sekolah yang tidak punya pengetahuan tentang makanan yang sehat dan aman. Tidak adanya data yang tersedia tentang jumlah dan lokasi sekolah yang mempunyai kantin juga perlu menjadi perhatian dalam rangka meningkatkan keamanan dan kualitas jajanan anak sekolah.
- 2) Beredarnya secara bebas bahan kimia berbahaya
Oleh karena kurangnya kesadaran dan ketidaktahuan serta daya beli masyarakat yang masih lemah pasca-krisis ekonomi, dapat membuka peluang bagi produsen pangan yang hanya berorientasi keuntungan tanpa memperhatikan keamanan, mutu dan gizi pangan. Akibatnya makin marak penggunaan bahan kimia berbahaya yang seperti formalin, boraks, dan pewarna tekstil yaitu Rodhamin B dan Metanil Yellow yang digunakan untuk pangan. Bahan kimia ini beredar secara bebas dan mudah didapatkan di pasaran, dan pengawasan peredaran bahan kimia yang bukan untuk pangan ini masih sulit dipantau oleh instansi yang berwenang.
- 3) Jumlah dan persebaran tenaga *District Food Inspector* dan Penyuluh Keamanan Pangan yang tidak merata
Tenaga DFI dan PKP yang berada di Kabupaten/Kota mempunyai peran dan fungsi dalam pengawasan dan pembinaan pada produsen pangan rumah tangga. Jumlah tenaga yang cenderung menurun karena mutasi atau purna tugas, makin jauh dari kebutuhan atau sesuai rasio jumlah penduduk (1:40.000), sehingga dapat mempengaruhi mutu dan keamanan pangan industri rumah tangga yang beredar.

4 Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

a. Tantangan :

- 1) Berdasarkan data hasil kajian PHBS Tatanan Rumah Tangga yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2015 persentase rumah tangga yang dipantau sebesar 46,45%, menurun bila dibandingkan tahun 2014 yaitu 49,99%. Rumah tangga sehat yaitu yang diwakili oleh rumah tangga yang mencapai strata sehat utama dan sehat paripurna tahun 2015 telah mencapai 76,73%, lebih tinggi dibanding tahun 2014 sebesar 71,46%. Fluktuasi presentase rumah tangga sehat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain metodologi pengambilan sampel yang belum terstandar baik jumlah maupun cara penentuan sampel, sasaran rumah tangga yang menjadi sampel juga selalu berubah setiap tahunnya.
- 2) Kabupaten/Kota dengan persentase rumah tangga sehat tertinggi adalah Klaten yaitu 96,43%, diikuti Kota Magelang 95,93 %, dan Kota Surakarta 94,71%. Sedangkan kabupaten/kota dengan persentase rumah tangga sehat terendah adalah Brebes yaitu 55,89%, diikuti Kendal 59,87%, dan Kudus 62,28%.
- 3) Tantangan yang dihadapi dalam peningkatan perilaku hidup bersih adalah sulitnya mengubah perilaku masyarakat yang biasanya berhubungan dengan faktor ekonomi, sosial dan budaya. Perubahan perilaku masyarakat tidak dapat terjadi dalam waktu yang singkat tetapi memerlukan proses yang panjang sehingga diperlukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang berkesinambungan.

b. Hambatan :

- 1) Perilaku Rumah Tangga yang memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya baru mencapai 61,60% sehingga masih ada sebesar 38,40% rumah tangga yang belum memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya (variabel KIA/Gizi).
- 2) Perilaku anggota rumah tangga melakukan aktivitas fisik (olah raga) mencapai 71,3% sehingga masih ada 28,7% rumah tangga yang belum melakukan aktivitas fisik secara rutin (variabel gaya hidup).
- 3) Penduduk dengan akses terhadap sanitasi layak. Capaian penduduk dengan akses sanitasi layak (jamban sehat) pada tahun 2015 adalah 78,70 %. Jenis sarana sanitasi dasar yang dipantau sebagai akses jamban sehat meliputi jamban komunal, leher angsa, plengsengan, dan cemplung (variabel kesehatan lingkungan).

5 Penguatan Kelembagaan Pangan dan Gizi

a. Tantangan :

- 1) Perlunya mengoptimalkan peran lembaga yang menangani masalah gizi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 2) Sinergitas program kegiatan dari Kementerian/Lembaga, SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pencapaian target di bidang pangan dan gizi yang telah terjabar pada Dokumen Perencanaan, SPKD, RAD-PG dalam percepatan pencapaian sasaran SDGs.
- 3) Penguatan DKP sebagai lembaga yang memformulasikan kebijakan peningkatan ketahanan pangan dan gizi.
- 4) Pengembangan sistem informasi kewaspadaan pangan dan gizi. Optimalisasi peran Posyandu di seluruh desa dan kelurahan sebagai aktualisasi nyata partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat dan didukung dengan peran aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan kader-kader PKK dibawah pembinaan Tim Penggerak PKK.

b. Hambatan :

- 1) Belum optimalnya penanganan masalah gizi di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan masih lemahnya koordinasi antara lembaga terkait.

- 2) Kinerja DKP tingkat Kabupaten/Kota masih belum optimal.
- 3) Penanganan ketahanan pangan seringkali menghadapi kendala pendataan dan informasi pangan yang kurang akurat dan cepat.
- 4) Monitoring dan evaluasi kinerja ketahanan pangan secara terpadu belum berjalan.
- 5) Pengembangan ketahanan pangan keluarga berbasis sumberdaya dan kearifan lokal belum banyak dikembangkan. Keterbatasan sumber daya manusia baik kuantitas dan kualitas di bidang pangan dan gizi baik sebagai tenaga yang bertugas di Puskesmas maupun sebagai penyuluh pangan dan gizi.

output, seperti yang dicantumkan pada indikator input di dalam logframe RAD-PG 2015-2019 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Kerangka Konsep Implementasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi
Serta Target Capaian Provinsi Jawa Tengah 2015-2019

<i>INPUT</i>	<i>OUTPUT</i>	<i>OUTCOME</i>	STATUS AWAL OUTCOME (2014)	TARGET OUTCOME (2019)
Program dan kegiatan SKPD Provinsi /Instansi	1) Ketersediaan pangan, akses ekonomi dan pemanfaatan pangan yang memadai;	1) Produksi padi (ton)	1) 9.648.104 ton	1) 10.392.833 ton
	2) Konsumsi makanan yang berpedoman pada gizi seimbang terutama pada kelompok rentan yaitu kelompok 1000 HPK, remaja perempuan, ibu menyusui, dan Balita;	2) Produksi jagung (ton)	2) 3.051.516 ton	2) 3.065.394 ton
		3) Produksi kedelai (ton)	3) 125.466 ton	3) 158.905 ton
		4) Produksi gula (ton)	4) 250.563 ton	4) 296.476 ton
		5) Produksi daging (kg)	5) 283.041.163 kg	5) 293.353.639 kg
	3) Penanggulangan gizi buruk akut;	6) Produksi ikan: (a). Perikanan tangkap (ton), (b). Perikanan budidaya (ton)	6) (a). 256.340 ton; (b). 373.291,5 ton	6) (a). 295.500 ton; (b). 510.433,3 ton
	4) Pemantauan dan stimulasi tumbuh kembang;	7) Produksi garam (ton)	7) 633.840,13 ton	7) 764.033 ton
	5) Akses terhadap Pelayanan kesehatan dan KB;	8) Skor PPH yang	8) 88,5	8) 87,2
	6) Jaminan terhadap akses kesehatan dan sosial;	9) Tingkat konsumsi kalori (kkal/kap/th)	9) 1.851 kkal/kap/th	9) 2.150 kkal/kap/th
	7) Pendidikan dan pemberdayaan perempuan, serta perkembangan anak usia dini;	10) Konsumsi ikan (kg/kap/th)	10) 18,69 kg/kap/th	10) 23,68 kg/kap/th
	8) Terjadi peningkatan pengetahuan gizi dan kesehatan pada remaja, wanita usia subur dan ibu;	11) Prevalensi anemia pada ibu hamil (%)	11) 30%	11) 28%
	9) Pencegahan dan manajemen penyakit infeksi;	12) Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) (%)	12) 3,65%	12) 8%
	10) Peningkatan sanitasi dan air bersih;	13) Persentase bayi <6 bulan ASI eksklusif (%)	13) 60,7%	13) 65%
	11) Peningkatan pemahaman dan pelaksanaan advokasi yang strategis;	14) Prevalensi balita <i>underweight</i> (%)	14) 16,57%	14) 15%
	12) Koordinasi vertikal dan horizontal;	15) Prevalensi balita kurus	15) 9,46%	15) 8%
13) Akuntabilitas, regulasi insentif, peraturan perundang-undangan;				

<i>INPUT</i>	<i>OUTPUT</i>	<i>OUTCOME</i>	STATUS AWAL OUTCOME (2014)	TARGET OUTCOME (2019)
	14) Investasi dan mobilisasi kapasitas; dan 15) Monitoring dan evaluasi tepat guna.	(<i>wasting</i>) (%) 16) Prevalensi balita pendek dan sangat pendek (<i>stunting</i>) (%) 17) Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia >18 tahun	16) 25,31% 17) 3,7%	16) 23% 17) <6%

Selain itu situasi di Jawa Tengah menunjukkan bahwa permasalahan gizi dan impiasinya cenderung lebih besar pada kelompok miskin dan hampir miskin, sehingga diupayakan adanya pemihakan multisektor kepada kelompok miskin. Prevalensi *stunting* pada Balita dan permasalahan gizi lainnya lebih tinggi pada kelompok miskin dan hampir miskin. Akibatnya beban masalah gizi pada kelompok miskin, baik pada tataran individu, keluarga maupun negara menjadi lebih kompleks, karena produktivitas dan penghasilan yang menurun terjadi bersamaan dengan beban pengeluaran yang tinggi untuk pelayanan kesehatan.

Penyebab kemiskinan lekat dengan karakteristik lain yang mempengaruhi status gizi dan kesehatan. Mereka yang miskin umumnya mempunyai pendidikan yang lebih rendah, kurang terpapar dan atau kurang tepat memahami pesan-pesan kesehatan yang baik, pangan yang aman, rendahnya akses terhadap air bersih dan lingkungan yang sehat, rendahnya akses terhadap promosi dan pelayanan kesehatan serta keluarga berencana. Oleh karena itu, agar upaya multi sektor dapat memberikan hasil yang optimal, upaya-upaya tersebut perlu difokuskan pada kelompok miskin dan hampir miskin, dengan tidak melupakan upaya untuk kelompok masyarakat lainnya.

C. Program/ Kegiatan dan Jumlah Indikator RAD PG

Tabel 4.2

Program/Kegiatan dan Jumlah Indikator RAD PG Tahun 2015-2019

NO	PILAR	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH INDIKATOR
1	Gizi Masyarakat	Program Pelayanan Kesehatan	Kegiatan Koordinasi Pelayan Gizi Masyarakat	16
			Kegiatan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	7
		Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit	Kegiatan Surveillance Epidemiologi, Penanganan KLB & Bencana, Penyiapan Pelayanan Kesehatan Haji dan Imunisasi	2
			Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	2
		Program Kesehatan Lingkungan	Kegiatan Pengawasan kualitas air dan sanitasi dasar	2
			Kegiatan Pengawasan Hygiene dan sanitasi TTU dan TPM	1
		Program Pengembangan Model Bkb - Posyandu- PAUD	Kegiatan Peningkatan kualitas ketahanan dan pemberdayaan keluarga	1
		Program Pendidikan Dasar	Kegiatan Bantuan Fasilitas Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah	1
		Program Bimbingan Masyarakat Islam	Kegiatan Pembinaan Agama Islam	2
2	Aksesibilitas Pangan Beragam	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan Pemantauan Harga Pangan Strategis	1
			Kegiatan Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat	1
			Kegiatan Pengembangan cadangan pangan provinsi Jawa Tengah	1
			Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Masyarakat	1
			Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	1
			Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	1
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	1
		Program Pengembangan Diversifikasi Dan Pola Konsumsi Pangan	Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Pengenalan Konsumsi Pangan B2SA	4
			Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1
		Program Pengembangan Keanekaragaman	Kegiatan pengembangan keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan	1

NO	PILAR	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH INDIKATOR
		Konsumsi Dan Keamanan Pangan		
		Program Pengembangan Agribisnis	Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	3
			Kegiatan Peningkatan Produksi Hortikultura	6
			Kegiatan penanaman dan intensifikasi tebu	2
			Kegiatan Peningkatan Kinerja Balai Inseminasi Buatan Ungaran	3
			Kegiatan Peningkatan Produksi Peternakan	1
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Kegiatan Pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap	1
		Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Kegiatan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1
		Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	1
		Program Optimalisasi Pengolahan Dan Pemasaran Produk Perikanan	Kegiatan peningkatan daya saing produk perikanan	1
			Kegiatan fasilitasi penguatan & pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan	2
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kegiatan Pengembangan Pengamekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	1
		Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kelompok Rentan Lainnya	Kegiatan Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat)	1
		Program Pengembangan Industri Agro, Kimia Dan Hasil Hutan	Kegiatan Pembinaan Lingkungan Sosial Dan Pemberdayaan Ekonomi di Wilayah IHT Bidang Industri Agro, Kimia Dan Hasil Hutan	1
			Kegiatan Gelar Produk Dan Akses Produk Serta Bahan Baku Tingkat Regional Dan Nasional Industri Industri Agro, Kimia Dan Hasil Hutan	1
		Program Peningkatan Logistik Daerah, Akses Pasar Dalam Negeri Dan Pemberdayaan UDKM	Kegiatan Pembinaan Lingkungan Sosial	1
			Kegiatan Pemantauan Stok, Distribusi & Harga Kepokmas Maupun Komoditi Strategis Lainnya.	1
			Kegiatan Pembinaan Dan Peningkatan	1

NO	PILAR	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH INDIKATOR
			Sarpras Usaha Dagang Dan Pasar Tradisional	
		Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Serta Jaringan Pengairan Lainnya	Kegiatan Pemeliharaan, Perbaikan Dan Pembangunan Prasarana Dan Sarana Irigasi.	1
		Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku	Kegiatan Pemeliharaan, Perbaikan Dan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Baku.	1
3	Mutu Dan Keamanan Pangan	Program Pengawasan Produk Dan Bahan Berbahaya	Kegiatan Sampling Dan Pengujian Obat Dan Makanan	2
			Kegiatan Pengawasan obat dan makanan	1
		Program Peningkatan Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan	7
		Program Peningkatan Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri	Kegiatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	1
		Program Pengembangan Agribisnis	Kegiatan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET) dan Kesejahteraan Hewan (KESRAWAN)	1
			Kegiatan Peningkatan Kinerja Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET)	1
			Kegiatan Peningkatan Mutu Dan Sertifikasi Hasil Produksi Pertanian	1
		Program Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan	Kegiatan Pembinaan Mutu Dan Keamanan Pangan	1
			Kegiatan Pengembangan Sertifikasi dan Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) pada Produk Pangan Segar	1
		Program Optimalisasi Pengolahan Dan Pemasaran Produksi Perikanan	Kegiatan Pengembangan dan pembinaan teknologi pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan dan kelautan	1
4	Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat	Program Promosi Dan Pemberdayaan	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi	2
			Kegiatan Penyelenggaraan promosi kesehatan tk provinsi	2
		Program Pendidikan Dasar	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Kesiswaan	2
		Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan LH	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Perdesaan dan warga sekolah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	1

NO	PILAR	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH INDIKATOR
		Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup	Kegiatan Koordinasi Peningkatan peranserta Kaum Perempuan dalam Pengelolaan LH untuk Menunjang Terciptanya Lingkungan yang Bersih dan Sehat	1
		Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan	Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau	1
		Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narkotika, Psk, Narkotika Dan Penyakit Lainnya)	Kegiatan Penjaringan dan Pendampingan Sosial PGOT dan Kelompok Rentan lainnya (PGOT, Anjal, Psikotik, Waria/WTS)	1
		Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Kegiatan Advokasi Pengembangan Kota Layak Anak	1
		Program Pembinaan, Pembinaan Dan Pemanduan Serta Pemasyarakatan Olah Raga	Kegiatan Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga	1
		Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Kegiatan Sosialisasi kebijakan pemerintah daerah melalui media massa	3
		Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah Dan Kawasan	Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	1
			Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	1
		Program Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan Dan Pola Investasi, Serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kegiatan Pembangunan Infrastruktur SPAM Perdesaan	1
		Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi	Kegiatan peningkatan penyediaan prasarana dan sarana air bersih	1
5	Kelembagaan Pangan Dan Gizi	Program Sumber Daya Kesehatan	Kegiatan Pemerataan Tenaga Kesehatan	2
		Program Perencanaan Sosial Budaya	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesra	2
			Kegiatan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan kependudukan	1
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Kegiatan peningkatan kemandirian dan penanganan kerentanan pangan di masyarakat	1
			Kegiatan Koordinasi & sinkronisasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan	1

NO	PILAR	PROGRAM	KEGIATAN	JUMLAH INDIKATOR
		Program Peningkatan Disertifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kegiatan Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan(gapoktan)	2
		Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Kegiatan peningkatan kualitas pengelola KRR dan PIK KRR	1
		Program Perlindungan Tenaga Kerja Dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Norma Ketenagakerjaan (APBD)	1
		Program Peningkatan Penerapan Norma Kerja Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan HI dan Jamsos	1
			Kegiatan Sosialisasi dan BinteK Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	1
		Program Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan Dan Penghapusan Pekerja Anak	Kegiatan Implementasi RAP (Rencana Aksi Provinsi-PBTA)	1
			Kegiatan Perlindungan Hak Normatif Pekerja Perempuan	1
			Kegiatan Diseminasi Teknis EEO bagi Pekerja Perempuan	1
			Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Norma Ketenagakerjaan	1
		Program Penempatan Dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Padat Karya Produktif (APBN)	1
		Program Penyediaan Dan Pelayanan Informasi Statistik BPS Provinsi	Kegiatan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	4
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	1
		Program Partisipasi Masyarakat	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan PKK dan Posyandu	2
			Jumlah	140

LAMPIRAN

MATRIK TARGET INDIKATOR RAD-PG 2015-2019

PILAR 1: GIZI MASYARAKAT

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Sampai dengan Tahun 2014	2015		2016		2017		2018		2019		Instansi/SKPD/ Urusan		
				Target Capaian	Anggaran (Rp)		Target Capaian	Anggaran (Rp)		Target Capaian	Anggaran (Rp)		Target Capaian		Anggaran (Rp)	
					APBD	APBN		APBD	APBN		APBD	APBN			APBD	APBN
1	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN															
	Kegiatan Koordinasi Pelayanan Gizi Masyarakat			886.500.000		600.000.000		1.009.132.000		1.110.045.000		1.110.045.000		Dinas Kesehatan		
	Persentase bayi usia 0-6 bulan mendapat ASI Eksklusif (%)	60,7	52		53		55		60		65		Dinas Kesehatan			
	Persentase bayi usia 6 bulan mendapat ASI Eksklusif (%)	40	42		44		47		50		55		Dinas Kesehatan			
	Persentase ibu hamil KEK mendapat PMT (%)	tad	50		65		80		95		95		Dinas Kesehatan			
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilan (%)	92,52	85		90		95		98		98		Dinas Kesehatan			
	Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan (%)	tad	75		80		85		90		95		Dinas Kesehatan			
	Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) (%)	tad	45		50		55		60		60		Dinas Kesehatan			
	Prevalensi anemia pada ibu hamil mencapai 28 % (%)	30	31		30		29		28		28		Dinas Kesehatan			
	Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) mencapai 8% (%)	3,65	9,5		9		8,5		8		8		Dinas Kesehatan			
	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita mencapai 17 % (%)	16,57	16		16		15,5		15,5		15		Dinas Kesehatan			
	Prevalensi kurus (wasting) pada anak balita mencapai 9,5% (%)	9,46	9		9		8,5		8,5		8		Dinas Kesehatan			
	Prevalensi pendek dan sangat pendek (stunting) pada anak baduta (bayi di bawah 2 tahun) mencapai 28% (%)	25,31	25		24,5		24		23,5		23		Dinas Kesehatan			
	Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia >18 tahun mencapai 15,4 % (%)	3,7	<4		<4		<5		<5		<6		Dinas Kesehatan			
	Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)	80,4	80		81		81,5		82		82		Dinas Kesehatan			
	Persentase Kab/ Kota yang mempunyai peraturan tentang ASI Eksklusif (%)	71,4	80		85		90		95		95		Dinas Kesehatan			
	Cakupan rumah tangga yang mengonsumsi garam beryodium (%)	89,38	90		92		94		95		95		Dinas Kesehatan			
	Persentase remaja puteri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) (%)	tad	15		20		25		30		35		Dinas Kesehatan			
	Kegiatan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak			3.200.000.000		2.150.000.000		2.150.000.000		2.150.000.000		2.200.000.000		Dinas Kesehatan		
	Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) (%)	98,57	78,00		81		85		90		90,00		Dinas Kesehatan			
	Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas 1, 7 dan 10 (%)	85,91	40		50		55		60		65,00		Dinas Kesehatan			
	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja (%)	28,69	30		35		40		45		50,00		Dinas Kesehatan			
	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) (%)	99,17	98,00		98,5		98,5		98,5		98,5		Dinas Kesehatan			
	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal empat kali (K4) (indikator sama pembinaan pelayanan kesehatan ibu) (%)	93,11	93		93,5		94		94,5		95		Dinas Kesehatan			
	Persentase Puskesmas Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) (%)	92,84	83		88		93		95		97,00		Dinas Kesehatan			

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Sampai dengan Tahun 2014	2015		2016		2017		2018		2019		Instansi/SKPD/ Urusan					
				Target Capaian	Anggaran (Rp)		Target Capaian	Anggaran (Rp)		Target Capaian	Anggaran (Rp)		Target Capaian		Anggaran (Rp)				
					APBD	APBN		APBD	APBN		APBD	APBN			APBD	APBN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil (%)	48,25	81			84			87			90			90,00			Dinas Kesehatan
2	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT																		
	Kegiatan Surveillance Epidemiologi, Penanganan KLB & Bencana, Penyiapan Pelayanan Kesehatan Haji dan Imunisasi				1.000.000.000			1.300.000.000			1.300.000.000			1.300.000.000			1.450.000.000		Dinas Kesehatan
		Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	93,4	92,00			92,00			92,5			93,00			93,5			Dinas Kesehatan
		Persentase Kab/Kota yang mempunyai kebijakan bencana atau wabah (%)		46,00			64,00			80,00			90,00			100,00			Dinas Kesehatan
	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular				500.000.000			500.000.000			600.000.000			650.000.000			700.000.000		Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu (%)		20			30			40			50			60			Dinas Kesehatan
		Persentase kab/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50 persen sekolah (%)		20			30			40			50			60			Dinas Kesehatan
3	PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN																		
	Kegiatan Pengawasan kualitas air dan sanitasi dasar				1.000.000.000			3.250.000.000			3.400.000.000			3.400.000.000			3.500.000.000		
		Persentase Desa Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (%)	55,5	28			29,00			30,00			30,00			30,00			Dinas Kesehatan
		Proporsi penduduk mempunyai akses air minum (%)	77	80			81,00			82,00			82,00			82,00			Dinas Kesehatan
	Kegiatan Pengawasan Hygiene dan sanitasi TTU dan TPM						81,00			82,00			82,00			82,00			Dinas Kesehatan
4	PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL BKB - POSYANDU- PAUD																		
	Kegiatan Peningkatan kualitas ketahanan dan pemberdayaan keluarga																		
		Persentase kelompok bina keluarga balita (BKB) aktif	91,13	96,35	142.175.000		96,40	132.205.000		96,45	145.425.500		96,50	159.968.050		96,55	175.964.855		BP3AKB
5	PROGRAM PENDIDIKAN DASAR																		
	Kegiatan Bantuan Fasilitas Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah																		
		Siswa yang mendapatkan program gizi anak sekolah (progras) (piloting) (% dan Kab)	100 /29	100 /29	1.566.000.000		100 /29	1.566.000.000		100 /29	1.566.000.000		100 /29	1.566.000.000		100 /29	1.566.000.000		Dinas Pendidikan
6	PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM																		
	Kegiatan Pembinaan Agama Islam																		
		Jumlah calon pengantin peserta kursus pra-nikah (Orang)		315.644	560.000.000		320.000	560.000.000		325.000	560.000.000		325.000	560.000.000		325.000	560.000.000		Kanwil Agama Jateng
		Pembinaan keluarga (Sakinah, Sukinah, Hitasukaya, Kristiani) (keg)		3	761.365.000		6,00	761.365.000		7	869.065.000		10	1.198.600.000		10	1.198.600.000		Kanwil Agama Jateng

MATRIK TARGET INDIKATOR RAD-PG 2015-2019

PILAR 2: AKSESIBILITAS PANGAN BERAGAM

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Sampai dengan Tahun 2014	2015		2016		2017		2018		2019		Instansi/SK PD/Urusan						
				Target Capaian	Anggaran (Rp)		Target Capaian	Anggaran (Rp)		Target Capaian	Anggaran (Rp)		Target Capaian		Anggaran (Rp)					
					APBD	APBN		APBD	APBN		APBD	APBN			APBD	APBN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN																				
	Kegiatan Peningkatan Akses Pangan Masyarakat dan Pemantauan Harga Pangan Strategis	Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen (Rp/kg)	4.214	3.700	1.043.400.000	395.764.000	3.700	689.095.000	437.950.000	3.700	650.000.000	386.500.000	3.700	800.000.000	450.000.000	3.700	1.000.000.000	600.000.000	BKP	
	Kegiatan Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat	Jumlah Desa Mandiri Pangan & Persentase penanganan daerah rawan pangan (desa & %)	305 desa & 56,25%	22 desa & 60%	2.833.600.000		24 desa baru & 60%	2.362.758.000		26 desa baru & 60%	4.225.000.000		30 desa baru & 60%	5.170.000.000		32 desa baru & 60%	6.165.000.000		BKP	
	Kegiatan Pengembangan cadangan pangan provinsi Jawa Tengah	Persentase penguatan cadangan pangan (%)	100,24	80,00%	1.759.200.000		90%	1.924.870.000		95%	2.050.000.000		100%	2.250.000.000		100%	2.450.000.000		BKP	
	Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Masyarakat	Ketersediaan pangan utama (ton)	5.725.783	5.746.958	328.950.000		5.769.946	80.000.000		5.793.026	600.200.000		5.816.198	800.000.000			820.000.000		BKP	
	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Jumlah gapoktan yang terfasilitasi (gapoktan)	58	58	997.875.000		58	790.500.000		58	1.500.000.000		58	1.550.000.000		58	1.600.000.000		BKP	
	Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	Jumlah lumbung yang difasilitasi (lumbung)	415	40	967.550.000		40	951.000.000		40	1.700.000.000		40	1.951.000.000		40	2.000.000.000		BKP	
2 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT																				
	Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	Jumlah kawasan mandiri pangan yang terfasilitasi (kawasan)		4 kawasan		600.000.000	1 kawasan	150.000.000	1 kawasan	150.000.000	1 kawasan	150.000.000	1 kawasan	150.000.000	1 kawasan	150.000.000	1 kawasan	150.000.000	BKP	
	Kegiatan Pengembangan Pengamkaran dan Keamanan Pangan	Jumlah pemberdayaan pekarangan pangan (desa)	84,00	328	6.338.697.000		276	13.600.000.000		100	20.000.000.000		100	20.000.000.000		100	20.000.000.000		20.000.000.000	BKP
3 PROGRAM PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI DAN POLA KONSUMSI PANGAN																				
	Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Penganalan Konsumsi Pangan B2SA	Konsumsi kalori mencapai 2150 kkal/kapita/hari (kkal/kap/th)	1.851	1.850	2.530.025.000		1.810	1.536.932.000		1.850	2.550.743.000		1.850	2.750.618.000		1.875	2.950.000.000		BKP	
		Konsumsi Protein /kap/hr (gram)	53,0	54,7			53			54			55			56			BKP	
		Skor PPH	91,7	91,13	50.000.000	100.000.000	91,5	107000000,00	125000000,00	86	115.000.000	140000000,00	87	125000000,00	150000000,00	87,2	140000000,00	175000000,00	BKP	
		Jumlah kelompok wanita tani desa pelaksana P2KP (KWT)	140	105	1.300.000.000,00		110	1.400.000.000,00		115	1.600.000.000		120,00	1.800.000.000,00		125,00	2.000.000.000,00		BKP	
	Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah KWT pengolah pangan alternatif yang difasilitasi (KWT)	146	42	758.750.000	381.886.000	44	630.300.000	125.000.000	46	1.128.000.000	150.000.000	48	1.296.000.000	200.000.000	50	1.466.000.000	225.000.000	BKP	
5 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS																				
	Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan				8.872.240.000	19.996.822.000		9.000.000.000	258.805.480.000		9.160.998.000	224.416.054.000		11.534.000.000	227.782.295.000		11.707.010.000	231.199.029.000	Dinas Pertanian	
		Produksi padi (ton)	9648104,00	11.301.422			10.269.110			10.310.186			10.351.427			10.392.833			Dinas Pertanian	
		Produksi jagung (ton)	3051516,00	3.212.391			3.028.901			3.041.017			3.053.181			3.065.394			Dinas Pertanian	
		Produksi kedelai (ton)	125466,00	129.794			147.191			150.993			154.795			158.905			Dinas Pertanian	
	Kegiatan Peningkatan Produksi Hortikultura				2.550.000.000	82.154.896.000		2.927.345.000	8.277.659.000		3.900.000.000	26.106.400.000		4.800.000.000	26.497.996.000		4.872.000.000	26.895.465.900	Dinas Pertanian	
		Produksi durian (ton)	101167,00	102.451			80.432			80.674			80.916			81.191			Dinas Pertanian	
		Produksi mangga (ton)	459669,00	396.636			433.013			436.260			439.532			442.828			Dinas Pertanian	
		Produksi salak (ton)	441841,00	471.463			457.757			461.877			466.033			470.248			Dinas Pertanian	
		Produksi cabe besar (ton)	167794,00	168.411			124.950			126.200			127.462			128.737			Dinas Pertanian	

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Sampai dengan Tahun 2014	2015		2016		2017		2018		2019		Instansi/SK PD/Urusan					
				Target Capaian	Anggaran (Rp)		Target Capaian	Anggaran (Rp)		Target Capaian	Anggaran (Rp)		Target Capaian		Anggaran (Rp)				
					APBD	APBN		APBD	APBN		APBD	APBN			APBD	APBN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Produksi bawang merah (ton)	519356,00	471.169			430.185			431.260			432.338			433.419			Dinas Pertanian
		Produksi kentang (ton)	292214,00	278.552			290.272			290.998			291.725			292.454			Dinas Pertanian
	Kegiatan penanaman dan intensifikasi tebu	Jumlah Produksi Tebu (ton)	5548006,00	3.826.118	728.400.000	373.543.942.000	5.332.570	728.400.000	8.543.611.000	4.450.000	750.000.000	23.800.000.000	4.460.000	1.000.000.000	26.180.000.000	4.465.000	1.100.000.000	28.900.000.000	Dinas Perkebunan
		Jumlah Produksi gula Provinsi (ton)	250563,00	277.010			367.947			298.595			297.705			296.476			Dinas Perkebunan
	Kegiatan Peningkatan Kinerja Balai Inseminasi Buatan Ungaran	a. Jumlah akseptor IB (ekor)	506.366	506.366	5.300.000.000		519.026	7.655.500.000		532.001	7.655.500.000		545.301	7.655.500.000		545.301	7.655.500.000		Dinas Peternakan dan Kesehatan
		b. Jumlah Produksi semen beku, melalui Peningkatan Kinerja Balai Inseminasi Buatan Ungaran (straw) :																	Dinas Peternakan dan Kesehatan
		- Sapi (dosis)	518.969	500.000			520.000			545.000			545.000			545.000			Dinas Peternakan dan Kesehatan
		- Kambing (dosis)	33.683	60.000			65.000			70.000			70.000			70.000			Dinas Peternakan dan Kesehatan
	Kegiatan Peningkatan Produksi Peternakan	- Produksi daging keseluruhan ternak (kg)	283.041.163	291.141.193			286.198.672			293.353.639			293.353.639			293.353.639			Dinas Peternakan dan Kesehatan
6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP																		
	Kegiatan Pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	256.340	281.700	10.327.774.000	3.423.957.000	282.500	7.282.755.000		283.715	9.150.000.000		293.475	10.065.000.000		295.500	11.071.500.000		Dinas Kelautan dan Perikanan
7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA																		
	Kegiatan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Prod-ksi perikanan budidaya (ton)	373.291,50	309.949,63	13.368.308.000	4.433.913.000	333.474,81	10.289.124.000		463.123,90	15.690.000.000		509.436,29	17.160.000.000		510.433,30	18.876.000.000		Dinas Kelautan dan Perikanan
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR																		
	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Produksi Garam (Ton)	633.840,13	841.543,56	800.000.000		824.211	850.000.000		694.575	900.000.000		729.304	950.000.000		764.033	950.000.000		Dinas Kelautan dan Perikanan
9	PROGRAM OPTIMALISASI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUK PERIKANAN																		
	Kegiatan peningkatan daya saing produk perikanan	Jumlah kegiatan FORIKAN dalam rangka meningkatkan tingkat konsumsi ikan di Jawa Tengah (kegiatan)	1,00	1	47.000.000		1	45.000.000		1	50.000.000		1	55.000.000		1	60.000.000		Dinas Kelautan dan Perikanan
	Kegiatan fasilitasi penguatan & pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan	Jumlah peserta pelaksanaan GEMARIKAN (orang)	1200,00	2.000	100.000.000		2.000	156.525.000		2.000	156.525.000		2.000	178.025.000		2.000	210.275.000		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Tingkat Konsumsi Makan Ikan (kg/kapita/tahun)	18,69	19,59			20,55			21,55			22,59			23,68			Dinas Kelautan dan Perikanan
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DAN KELOMPOK RENTAN LAINNYA																		
	Kegiatan Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat)	Jumlah keluarga sangat miskin (KSM) yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat PKH (keluarga)	634.498	642.774	0,00	945.510.536	634498,00	381.750.000	1.157.087.050.000	634.498	381.750.000	1.157.087.000	634.490	600.000.000	1.157.087.000	634.495		1.157.087.000	Dinas Sosial
12	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO, KIMIA DAN HASIL HUTAN																		
	Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan	Jumlah industri pangan yg dibina (IKM)	40	50	4.876.875.000		167	9.000.000.000		150	2.250.000.000		175	2.625.000.000		200	3.000.000.000		Disperindag
	Kegiatan Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro, kimia dan hasil hutan	Jumlah industri pangan yang difasilitasi promosi produk (IKM)	50	50	382.425.000		50	950.000.000		50	1.750.000.000		50	1.825.000.000		50	1.825.000.000		Disperindag

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Sampai dengan Tahun 2014	2015			2016			2017			2018			2019			Instansi/SK PD/Urusan
				Target Capaian	Anggaran (Rp)		Target Capaian	Anggaran (Rp)		Target Capaian	Anggaran (Rp)		Target Capaian	Anggaran (Rp)		Target Capaian	Anggaran (Rp)		
					APBD	APBN		APBD	APBN		APBD	APBN		APBD	APBN		APBD	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13	PROGRAM PENINGKATAN LOGISTIK DAERAH, AKSES PASAR DALAM NEGERI DAN PEMBERDAYAAN UDKM																		
	Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial	Ketersediaan data harga kebutuhan pokok masyarakat (komoditi)		18	171.840.000		18	200.000.000		18	750.000.000		18	800.000.000		18	800.000.000		Disperindag
	Kegiatan Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya.	Disparitas harga antar kab/kota		0,20			0,25			0,25			0,30			0,30			Disperindag
	Kegiatan pembinaan dan peningkatan sarpras usaha dagang dan pasar tradisional	Jumlah pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan/ pasar rakyat (unit pasar rakyat)		29,00			10,00	379.000.000		10,00	100.000.000		10	100.000.000		10	100.000.000		Disperindag
14	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA SERTA JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA																		
	Kegiatan Pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana irigasi.	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (Ha)	63.826	66.164 Ha (82 Di) (76%)	81.423.390.000	95.765.230.000	67.755 Ha (78%)	124.187.170.000	97.634.020.000	69.492 Ha (80%)	79.574.460.000	107.397.430.000	71.229 Ha (82%)	102.522.680.000	165.746,61	72.967 Ha (84%)	112.774.948.000,00	174.627.500.000	PSDA
15	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU																		
	Kegiatan Pemeliharaan, perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana air baku.	Persentase pemenuhan kebutuhan air baku (Jt m3)		385,941 Jt m3 (54%)	20.918.240.000		400,236 Jt m3 (56%)	118.363.760.000		414,530 Jt m3 (58%)	138.161.730.000		428,824 Jt m3 (60%)	151.977.900.000,00		443,118 Jt m3 (62%)	167.175.690.000,00		PSDA

MATRIK TARGET INDIKATOR RAD-PG 2015-2019

PILAR 3: MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Sampai dengan Tahun 2014	2015		2016		2017		2018		2019		Instansi/SKPD/Urusan					
				Target Capaian	Anggaran (Rp)		Target Capaian	Anggaran (Rp)		Target Capaian	Anggaran (Rp)		Target Capaian		Anggaran (Rp)				
					APBD	APBN		APBD	APBN		APBD	APBN			APBD	APBN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	PROGRAM PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA																		
	Kegiatan sampling dan pengujian Obat dan Makanan	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis (Sampel)	3.800	3800		4.656.000.000	3800		5.122.000.000	3800		5.634.000.000	3.800		6.198.000.000	3800		6.817.000.000	BBPOM
		Pemenuhan target sampling produk Obat disektor publik (IFK) (%)	100	100			100			100			100			100			BBPOM
	Kegiatan Pengawasan obat dan makanan	Persentase makanan yang memenuhi syarat (%)	75	80			82			84			86			88			BBPOM
2	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN																		
	Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan (%)	35	36,92		257.000.000	38,5		283.000.000	40,1		312.000.000	42		343.000.000	43,3		377.000.000	BBPOM
		Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan (%)	27	27,35		1.958.000.000	27,8		2.154.000.000	28,3		2.369.000.000	29		2.606.000.000	29,2		2.867.000.000	BBPOM
		Jumlah perkara dibidang Obat dan Makanan (Kasus)	16	16		1.187.000.000	17		1.306.000.000	18		1.437.000.000	19		1.580.000.000	20		1.738.000.000	BBPOM
		Jumlah layanan publik BB/BPOM (layanan)	4.025	4050		2.054.000.000	4075		2.259.000.000	4100		2.485.000.000	4.125		2.734.000.000	4150		3.007.000.000	BBPOM
		Jumlah pasar yang diintervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya (unit)	5	5		tanpa anggaran	6		202.645.000	7		220.000.000	8		235.000.000	9		250.000.000	BBPOM
		Jumlah kab/kota yang sudah menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang IRTP (Kab/Kota)	35	35		tanpa anggaran	35		tanpa anggaran	35		tanpa anggaran	35		tanpa anggaran	35		tanpa anggaran	BBPOM
		Jumlah desa pangan aman yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan (desa)	10	5		771.000.000	5		848.000.000	5		933.000.000	5		1.027.000.000	5		1.129.000.000	BBPOM
3	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI																		
	Kegiatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Jumlah barang beredar dan jasa yang diawasi sesuai SNI (unit)		550		232.600.000	650		350.000.000	700		750.000.000	1.000		1.000.000.000	1.000		1.000.000.000	Dinperindag
4	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS																		
	Kegiatan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET) dan Kesejahteraan Hewan (KESRAWAN)	Jumlah produsen pangan asal hewan yang mempunyai ijin operasional (bersertifikat) NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Unit)	10,00	10		61.000.000	6		61.000.000	6		61.000.000	6		61.000.000	6		61.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Kegiatan Peningkatan Kinerja Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (KESMAVET)	Jumlah sampel Produk Hewan yang di uji di Balai Pelayanan Kesmavet (sampel)	15964,00	16.500		1.650.000	17.000		1.650.000	17.000		3.303.632.000	17.000		3.303.632.000	17.000		3.303.632.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	Kegiatan peningkatan mutu dan sertifikasi hasil produksi pertanian	Jumlah sertifikat sistem pertanian organik (sertifikat)	4,00	10		228.000.000	5		262.500.000	3		160.000.000	3		180.000.000	3		200.000.000	Dinas Pertanian TPH
5	PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN																		
	Kegiatan Pembinaan mutu dan Keamanan pangan	Jumlah sekolah yang teredukasi tentang mutu dan keamanan pangan (Sekolah)					30		150.000.000	30		150.000.000	30		150.000.000	30		150.000.000	BKP
	Kegiatan Pengembangan Sertifikasi dan Pengawasan Batas Maksimum Residu (BMR) pada Produk Pangan Segar	Jumlah sertifikasi prima dan pendaftaran pangan segar (sertifikat, No Pendaftaran)		11, 21			12, 22		554.700.000	6, 30		1.190.538.000	7, 32		1.369.592.000	8, 34		1.400.000.000	BKP

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Sampai dengan Tahun 2014	2015		2016		2017		2018		2019		Instansi/SKPD/Urusan					
				Target Capaian	Anggaran (Rp)		Target Capaian	Anggaran (Rp)		Target Capaian	Anggaran (Rp)		Target Capaian		Anggaran (Rp)				
					APBD	APBN		APBD	APBN		APBD	APBN			APBD	APBN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	PROGRAM OPTIMALISASI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN Kegiatan Pengembangan dan pembinaan teknologi pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan dan kelautan	Jumlah UPI yang mempunyai SKP (Unit)	40,00	42	25.090.000		44	40.000.000		46	45.000.000		48	50.000.000		50	55.000.000		Dinas Kelautan dan Perikanan

MATRIK TARGET INDIKATOR RAD-PG 2015-2019

PILAR 4: PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Sampai dengan Tahun 2014	2015		2016		2017		2018		2019		Instansi/SKPD/Urusan					
				Target Capaian	Anggaran (Rp)		Target Capaian	Anggaran (Rp)		Target Capaian	Anggaran (Rp)		Target Capaian		Anggaran (Rp)				
					APBD	APBN		APBD	APBN		APBD	APBN			APBD	APBN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN																			
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi	Proporsi rumah tangga sehat (Rumah Tangga Ber-FHBS) (%)	71,46	75	168.626.000		75,20	158.488.000		75,40	204.037.000		75,50	224.441.000,00		75,50	224.441.000		Dinas Kesehatan
		Peningkatan mutu desa siaga - Proporsi desa/kelurahan siaga aktif mandiri (%)	6,84	5,35	1.848.485.000		5,45	1.940.909.000		5,55	2.037.955.000		5,65	2.139.853.000		5,65	2.139.853.000		Dinas Kesehatan
	Kegiatan Penyelenggaraan promosi kesehatan tk provinsi	Jumlah penyuluhan melalui media elektronik (kali)					16	500.308.000		18	550.338.000		20	605.372.000		20	605.372.000		Dinas Kesehatan
		Jumlah penyuluhan melalui media cetak (kali)					8	431.863.000		10	475.050.000		12	522.555.000		12	522.555.000		Dinas Kesehatan
2 PROGRAM PENDIDIKAN DASAR																			
	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Kesiswaan	Jumlah Kabupaten/Kota yang berpartisipasi mengikuti Kejuaraan Dokter Kecil (kab/kota)	35	35	116.981.000		35	124000000		35	130000000		35	135000000		35	140000000		Dinas Pendidikan
		Jumlah Kabupaten/Kota yang berpartisipasi mengikuti Kejuaraan Kader Kesehatan Remaja (kab/kota)	35	35	200.321.000		35	241000000		35	245000000		35	250000000		35	255000000		Dinas Pendidikan
3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LH																			
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat Perdesaan dan warga sekolah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah warga sekolah yang peduli terhadap budaya bersih dan sehat (sekolah)	443	95	308.500.000		95	350.000.000		90	400.000.000		90	400.000.000		90	450.000.000		Badan Lingkungan Hidup
4 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP																			
	Kegiatan Koordinasi Peningkatan peranserta Kaum Perempuan dalam Pengelolaan LH untuk Menunjang Terciptanya Lingkungan yang Bersih dan Sehat	Jumlah peningkatan kinerja kaum perempuan dalam penanggulangan daur ulang sampah, pembuatan kompos dan pemanfaatan pekarangan (orang)	535	210	365.600.000		210	300.000.000		120	300.000.000		120	300.000.000		120	350.000.000		Badan Lingkungan Hidup
5 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN																			
	Kegiatan Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembaku dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembaku	Jumlah warga masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan penataan lingkungan pemukiman (orang)	600	250	300.000.000		210	1.100.000.000		300	1.100.000.000		300	1.100.000.000		300	1.500.000.000		Badan Lingkungan Hidup
6 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN PENYAKIT LAINNYA)																			
	Kegiatan Penjaringan dan Pendampingan Sosial PGOT dan Kelompok Rentan lainnya (PGOT, Anjal, Psikotik, Waria/WTS)	Jumlah Penjaringan melalui TRC pada PMKS Jumlah Tuna Sosial, PGOT yang terjerang dan terhabilitasi (orang)	400	326	100.500.000		326	78.240.000		326	78.240.000		326	78.240.000		326	78.240.000		Dinas Sosial
7 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK																			
	Kegiatan Advokasi Pengembangan Kota Layak Anak	Rasio Kabupaten/Kota menuju Kota layak anak (%)		88,57			94,3	123.290.000		100	135.619.000		100	149.180.900		100	164.098.990		BP3AKB
8 PROGRAM PEMBIBITAN, PEMBINAAN DAN PEMANDUAN SERTA PEMASYARAKATAN OLAH RAGA																			
	Kegiatan Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga	Terseleenggaranya Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga (orang)	60.000	20.000	3.550.000.000		20.000	3.650.000.000		20.000	3.750.000.000		20.000	4.000.000.000		20.000	4.250.000.000		Dinas Pemuda dan Olah Raga
9 PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI																			
	Kegiatan Sosialisasi kebijakan pemerintah daerah melalui media massa	Sosialisasi kebijakan pemerintah daerah terkait Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat melalui :																	
		a. Melalui radio lokal (kali)					1	7.500.000		1	10.000.000		2	20.000.000		2	25.000.000		Dishubkominfo
		b. Melalui televisi lokal (kali)		1	15.000.000					1	15.000.000		2	30.000.000		2	40.000.000		Dishubkominfo
		c. Melalui konten cetak (lembar)								500	2.500.000		1000	5.000.000		1000	7.000.000		Dishubkominfo

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Sampai dengan Tahun 2014	2015			2016			2017			2018			2019			Instansi/SKPD/Urusan
				Target Capaian	Anggaran (Rp)		Target Capaian	Anggaran (Rp)		Target Capaian	Anggaran (Rp)		Target Capaian	Anggaran (Rp)		Target Capaian	Anggaran (Rp)		
					APBD	APBN		APBD	APBN		APBD	APBN		APBD	APBN		APBD	APBN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN KAWASAN																		
	Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Kab/Kota yang terlayani Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja / IPLT (Kab/Kota)	22	4		10.046.036.000	2 (Grobogan & Kota Magelang)		3.758.546.000	1		5.000.000.000	5		15.000.000.000	5		15.000.000.000	Dinas Ciptataru
	Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	Jumlah Kab/Kota yang terlayani Infrastruktur tempat pemrosesan Akhir Sampah	11	1		6.658.377.000	2		33.011.660.000	5		50.000.000.000	2		50.000.000.000	2		50.000.000.000	Dinas Ciptataru
11	PROGRAM PENGATURAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN DAN POLA INVESTASI, SERTA PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM																		
	Kegiatan Pembangunan Infrastruktur SPAM Perdesaan	Jumlah lokasi SPAM perdesaan berbasis masyarakat (Lokasi PAMSIMAS)	2008-2014 = 439.280 SR	30 Kab/Kota (518 lokasi)				250.000.000		462	750.000.000	161.170.000.000	527	750.000.000	184.450.000.000	493	750.000.000	172.550.000.000	Dinas Ciptataru
12	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN SANITASI																		
	Kegiatan peningkatan penyediaan prasarana dan sarana air bersih	Jumlah SPAM Regional	1 SPAM Reg (Bergas)				Keburep	10.000.000.000	30000000000,00	2 SPAM Reg (Keburejo Petalong)	15.000.000.000	92.749.204.000 60.000.000.000 105.000.000.000	3 SPAM Reg (Keburejo Petalong Wosokusas)	30.000.000.000	64.775.000.000 47.526.230.000 262.635.400.000	2 SPAM Reg	40.000.000.000,00	94.496.277.000 96.704.500.000 168.279.200.000	Dinas Ciptataru

MATRIK TARGET INDIKATOR RAD-PG 2015-2019

PILAR 5: KELEMBAGAAN PANGAN DAN GIZI

No	Program/ Kegiatan	Indikator	Capaian Sampai dengan Tahun 2014	2.015		2.016		2.017		2.018		2.019		Instansi/SKPD/Urusan					
				Target Capaian	Anggaran (Rp)		Target Capaian	Anggaran (Rp)		Target Capaian	Anggaran (Rp)		Target Capaian		Anggaran (Rp)				
					APBD	APBN		APBD	APBN		APBD	APBN			APBD	APBN			
1	PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN																		
	Kegiatan Pemerataan Tenaga Kesehatan	Jumlah pelugas gizi di Kab/Kota (orang)	840	840			850			860			870			Dinas Kesehatan			
		Rasio Jumlah Tenaga Gizi dan Puskesmas	0,90	0,96			0,97			0,98			0,99			Dinas Kesehatan			
2	PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA																		
	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesra					456.000.000				379.576.000			466.000.000			475.000.000	Bappeda		
		Jumlah Kab/Kota yang telah mempunyai dan menerapkan Perda GAKY (Kab/Kota)	19	20			20			20			20			20	Bappeda		
		Jumlah Kab/Kota yang telah membentuk Tim GAKY	8	13			35			35			35			35	Bappeda		
	Kegiatan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan kependudukan	Jumlah Koordinasi perencanaan dan evaluasi dalam upaya penganggulangan kemiskinan (Rakor TKPK)	2	2	20.000.000		2	20.000.000		2	20.000.000		2	20.000.000		2	20.000.000	Bappeda	
3	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN																		
	Kegiatan peningkatan kemandirian dan penanganan kerentanan pangan di masyarakat	Jumlah Kabupaten yang melaksanakan kegiatan SKPG (kab/kota)	10	10	2.833.600.000		10	20.000.000		12	25.000.000		14	30.000.000		16	35.000.000	BKP	
	Kegiatan Koordinasi & sinkronisasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan	Jumlah koordinasi yang dilakukan oleh Dewan Ketahanan Pangan (DKP) dalam mendukung pangan dan gizi (Rakor)	2	2	54.000.000		1	35.000.000		2	70.000.000		2	70.000.000		2	70.000.000	BKP	
4	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT																		
	Kegiatan Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan (gapoktan)	Jumlah lembaga distribusi pangan masyarakat/LDPM (Gapoktan)	143	23			6	4.562.837.000										BKP	
		Jumlah usaha pangan masyarakat (UPM)/Toko Tani Indonesia (TTI) (loko)	Belum ada kegiatan TTI				40			120.000.000		40			120.000.000		40	120.000.000	BKP
5	PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR)																		
	Kegiatan peningkatan kualitas pengelola KRR dan PIK KRR	Presentase kelompok bina keluarga remaja (BKR) aktif		1			1	53.280.000		1	175.000.000		1	192.500.000		1	211.750.000	BP3AKB	
6	PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN																		
	Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Norma Ketenagakerjaan (APBD)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja, waktu istirahat, dan pengupahan (perusahaan)	700	788	170.575.000		828	166.056.000	69.500.000	740	150.000.000	100.000.000	775	200.000.000	100.000.000	800	225.000.000	125.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN NORMA KERJA DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA																		
	Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan HI dan Jamsos	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma jaminan sosial tenaga kerja dalam SJSN (perusahaan)	20.450	20.948	30.000.000	100.000.000	21.450	30.000.000	30.000.000	21.950	40.000.000	30.000.000	22.350	40.000.000	30.000.000	22.850	40.000.000	30.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Kegiatan Sosialisasi dan BinteK Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah sosialisasi SJSN program ketenagakerjaan dan kesehatan (orang)	6 akt/@ 35 org apbd /100 org apbn	7 akt/@ 35 org apbd /100 org apbn	30.000.000	100.000.000	4 Akt	30.000.000	30.000.000	5 Akt	40.000.000	30.000.000	5 Akt	40.000.000	30.000.000	5 Akt	40.000.000	30.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN DAN PENGHAPUSAN PEKERJA ANAK																		
	Kegiatan Implementasi RAP (Rencana Aksi Provinsi-PBTA)	Jumlah pekerja anak yang ditarik dari bentuk pekerjaan (terbunuk anak (BPTA) (orang)	5.800	7.050	877.200.000		1.251	994.685.000	10.275.000.000	1.311	950.000.000	10.625.000.000	1.371	950.000.000	10.975.000.000	1.431	950.000.000	11.325.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Kegiatan Perlindungan Hak Normatif Pekerja Perempuan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma perlindungan tenaga kerja Perempuan (perusahaan)	700	785	72.000.000		95	80.000.000	182.000.000	100		200.000.000	110		250.000.000	120		300.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Kegiatan Diseminasi Teknis EEO bagi Pekerja Perempuan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma penghapusan diskriminasi tenaga kerja perempuan (perusahaan)	700	795	191.900.000		195	104.260.000	78.030.000	200		200.000.000	220		250.000.000	240		300.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Norma Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma perlindungan pekerja anak (perusahaan)	700	795	170.575.000		25		36.400.000	50		75.000.000	75		130.000.000	100		175.000.000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

